



LAPORAN TAHUNAN 2025

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kesehatan yang diberikan, sehingga Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selama Tahun 2025. Selain itu, laporan ini menggambarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus menjadi tolok ukur capaian kinerja organisasi berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pembangunan serta operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tahunan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 9 Januari 2026

Pimpinan Penyelenggara
PTSA UPT KKP Pelabuhan
Perikanan Samudera Cilacap



Indas Masriah, S.Pi, M.Pi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Pendahuluan	6
Latar Belakang	6
Dasar Hukum	7
Kedudukan	8
Maksud dan Tujuan	9
Tugas dan Fungsi	10
Struktur Organisasi	12
Sumber Daya Manusia	18
Anggaran	24
Ruang Lingkup (Sistematika)	24
Program, Kinerja dan Anggaran	26
Visi dan Misi	26
Tujuan dan Sasaran Program	26
Target Kinerja	27
Alokasi Anggaran	29
Realisasi Anggaran	30
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	31
Capaian Indikator Kinerja Utama	35
Kegiatan Operasional PPS Cilacap	57
Frekuensi Kunjungan Kapal dan Kapal Bongkar	57
Produksi Perikanan Tangkap	58
Pemeriksaan Kapal Bongkar	61
Pelaksanaan Sistem PIPP	62
Penilaian Evaluasi Kinerja	63
Pengawasan Kapal yang Beraktifitas di Kawasan Pelabuhan	64
Pelayanan Persetujuan Berlayar	65
Pendataan Log Book	55
Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	67
Pendataan Pelaksanaan Doking Kapal	68
Penerbitan SHTI	68
Pelayanan SCPIB, SKPI, Asuransi Nelayan dan PKL	69
Penyuluhan Perikanan	70
Layanan Media Online	71
Jejaring Sosial Media dan Website	72
Kegiatan K5	72
Kesehatan Pelabuhan	74
Pelayanan Kepada Masyarakat	75
Surat Menyurat	78
Penutup	79
Kesimpulan	79
Rekomendasi dan Tindak Lanjut	80

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 merupakan refleksi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Selain itu, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai Unit Pelayanan Publik, terus berupaya dalam mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholder. Peningkatan integritas dan kualitas pelayanan dengan mengusung core value dan jargon BerAKHLAK MANTEEP sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan.

Core Value dan jargon BerAKHLAK MANTEEP diwujudkan dengan:

1. Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Atap pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Inovasi digital melalui aplikasi SI ANTASENA yang memberikan kemudahan diantaranya adalah meningkatkan efisiensi proses antrian pengurusan surat kedatangan dan keberangkatan kapal, kemudahan dalam pemantauan pengaduan layanan, dan menghubungkan aplikasi seluruh instansi yang tergabung dalam PTSA PPS Cilacap;
3. Masyarakat secara transparan dapat mengakses informasi pelayanan publik melalui website PPS Cilacap serta capaian kinerja melalui aplikasi Kinerjaku;
4. Petugas pelayanan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan/diklat sesuai dengan kompetensinya yang tercermin dalam Indeks IP ASN PPS Cilacap yang pada Tahun 2025 ini mencapai 90,71;
5. Menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai melalui kegiatan outbond;

6. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai PPS Cilacap, melaksanakan upacara dan apel pagi;
7. Transformasi digital pada data base aktifitas kapal melalui aplikasi SRIKANDI dalam mendukung kecepatan pelayanan Tambat labuh. SRIKANDI PPS Cilacap adalah Sistem Monitoring Kapal Ikan di PPS Cilacap yang merupakan aplikasi pendataan kapal di dalam kolam PPS Cilacap yang dapat diakses secara real time.
8. Inovasi digital ePas yang menampilkan pembukuan Pas Masuk secara real time dan akuntable;
9. Sinergitas dengan instansi terkait dalam pelayanan satu atap, Pengendalian keamanan dan ketertiban melalui pembentukan Tim Keamanan Terpadu dari unsur kemaritiman dan perangkat daerah serta melaksanakan Jumat Kliwon bersih bersama stakeholders.

Dalam mendukung upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan terus berupaya mengembangkannya sesuai dengan tuntutan pelayanan, baik fasilitas pokok, fungsional, maupun penunjang serta didukung oleh sumberdaya manusia dan pembiayaan yang bersumber dari APBN.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai pelabuhan perikanan terbesar di pantai selatan Jawa, PPS Cilacap memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perikanan tangkap, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan operasional perikanan, tetapi juga sebagai simpul penting dalam rantai pasok hasil perikanan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pelaku usaha perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, PPS Cilacap senantiasa mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan agar selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Upaya tersebut dilakukan melalui perencanaan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan, dengan berlandaskan pada visi dan misi yang jelas, serta tujuan dan sasaran yang terukur. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu menghasilkan keluaran sesuai indikator kinerja yang telah ditentukan, sekaligus menjawab tuntutan dan harapan masyarakat perikanan serta pengguna jasa pelabuhan.

Program utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, menjadi landasan bagi setiap langkah yang diambil oleh PPS Cilacap. Dalam konteks tersebut, pelabuhan ini berperan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus penggerak kegiatan perikanan tangkap yang berorientasi pada keberlanjutan. Berbagai kebijakan dan program yang disusun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, serta daya saing sektor perikanan, tanpa mengabaikan aspek kelestarian sumber daya dan lingkungan.

Sepanjang Tahun 2025, PPS Cilacap telah melaksanakan beragam kegiatan sesuai dengan mandat yang diberikan. Kegiatan tersebut mencakup pelayanan operasional pelabuhan, pengawasan dan pengendalian aktivitas perikanan, pembinaan terhadap nelayan dan pelaku usaha, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, pelabuhan juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Semua langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelabuhan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian yang telah diraih, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjut yang direncanakan, maka disusunlah Laporan Tahunan PPS Cilacap Tahun 2025. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas publik yang mencerminkan komitmen pelabuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan tahunan diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pelabuhan, sekaligus menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya laporan tahunan ini, diharapkan terwujud kesinambungan program dan kegiatan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

KEDUDUKAN

PPS Cilacap merupakan salah satu pelabuhan perikanan strategis di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung aktivitas perikanan tangkap. Pembangunan pelabuhan diawali pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1994. Setelah melalui proses uji coba operasional, pelabuhan diresmikan penggunaannya pada tanggal 18 November 1996. Sejak saat itu, PPS Cilacap menjadi pusat kegiatan perikanan tangkap di pantai selatan Jawa, sekaligus menjadi simpul penting dalam rantai pasok hasil perikanan nasional.

Pada awalnya, berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 16 Agustus 1995, PPS Cilacap ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Tipe B (Nusantara). Seiring dengan perkembangan kegiatan perikanan tangkap yang semakin pesat, status pelabuhan kemudian ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Tipe A (Samudera) melalui Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86/M/PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001. Peningkatan status tersebut mencerminkan peran dan kapasitas PPS Cilacap yang semakin besar dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap berskala nasional maupun internasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, ditetapkan PPS Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kedudukan tersebut, pelabuhan ini memiliki mandat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan operasional pelabuhan, pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Kedudukan PPS Cilacap tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis. Sebagai pelabuhan perikanan tipe samudera, PPS Cilacap berfungsi sebagai pusat kegiatan kapal-kapal perikanan berukuran besar yang melakukan penangkapan hingga ke perairan lepas. Hal ini PPS Cilacap sebagai salah satu tulang punggung sektor perikanan tangkap Indonesia, sekaligus sebagai instrumen penting dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

Dengan kedudukan yang jelas dan kuat, PPS Cilacap diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal, baik dalam aspek pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, maupun kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kedudukan ini juga menegaskan komitmen pelabuhan untuk senantiasa beradaptasi dengan dinamika sektor perikanan, memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta menjadi garda terdepan dalam mendukung terwujudnya perikanan tangkap yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Tahunan PPS Cilacap Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Laporan ini menjadi instrumen penting dalam mendokumentasikan seluruh capaian, kendala, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh pelabuhan dalam mendukung program pengelolaan perikanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta keberlanjutan sumber daya perikanan.

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk menyediakan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPS Cilacap. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik melalui penyajian informasi yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, laporan tahunan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai wujud komitmen pelabuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun tujuan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah:

- Memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.
- Menyajikan data dan analisis mengenai kendala yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasinya.
- Menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan tahun berikutnya.
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja PPS Cilacap.
- Mendukung terwujudnya kesinambungan program pengelolaan perikanan yang berdaya guna, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPS Cilacap memiliki kedudukan yang jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Dengan dasar hukum tersebut, PPS Cilacap diberi mandat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan sekaligus fungsi perusahaan dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Fungsi Pemerintahan

Dalam lingkup fungsi pemerintahan, PPS Cilacap bertugas melaksanakan pelayanan publik, pengawasan, serta pengendalian kegiatan perikanan. Fungsi tersebut mencakup:

- Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan.
- Pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan.
- Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan.
- Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, termasuk pengaturan keberangkatan, kedatangan, serta aktivitas kapal di pelabuhan.
- Pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan, serta membantu pengendalian sumber daya ikan.
- Pengendalian lingkungan pelabuhan, meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja.
- Publikasi operasional pelabuhan, termasuk hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas perikanan.
- Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
- Fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan.
- Fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan.
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanaan.
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Fungsi pemerintahan ini menegaskan peran PPS Cilacap sebagai pusat pelayanan publik yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Fungsi Pengusahaan

Selain fungsi pemerintahan, PPS Cilacap juga menyelenggarakan fungsi pengusahaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan jasa kepelabuhanan. Fungsi tersebut meliputi:

- Pelayanan bongkar muat ikan.
- Pelayanan pengolahan hasil perikanan.

- Pemasaran dan distribusi ikan.
- Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan.
- Pelayanan docking dan galangan kapal perikanan.
- Pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan.
- Penyelenggaraan wisata bahari.
- Fasilitas tempat pelayanan lembaga keuangan.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi perusahaan ini menegaskan peran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan yang mendukung peningkatan nilai tambah hasil perikanan, memperkuat daya saing produk perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Peran Strategis

Dengan melaksanakan kedua fungsi tersebut secara terpadu, PPS Cilacap tidak hanya berperan sebagai simpul operasional perikanan tangkap, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan ekonomi perikanan. Kedudukan ini menegaskan komitmen PPS Cilacap untuk menjalankan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel, serta beradaptasi dengan dinamika sektor perikanan yang semakin kompleks.

PPS Cilacap diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung terwujudnya perikanan tangkap yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia.

STRUKUR ORGANISASI

Susunan dan tata kerja Pelabuhan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terdiri dari:

1. Subbagian Umum.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagai berikut:

- ❖ Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
- ❖ Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

Sebagai pelaksanaan amanat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dibentuk susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.104/PPC/KP.440/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Susunan Keanggotaan Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Berikut adalah susunan Tim Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap:

1. Subbagian Umum

Tim Kerja Dukungan Manajerial bertanggung jawab atas 9 IKU dukungan manajemen yakni:

- ❖ Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (yang telah dinilai WBK) (nilai)
- ❖ Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (persen)
- ❖ Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)
- ❖ Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (indeks)
- ❖ Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)
- ❖ Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (persen)
- ❖ Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)

- ❖ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)
- ❖ Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (Indeks)

Uraian Fungsi:

- Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai)
- Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparaturnya pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparaturnya lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

2. Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab atas 2 IKU yakni:

- ❖ Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (Ton)
- ❖ Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)

Uraian Fungsi:

- Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP

3. Tim Kerja Kesyahbandaran

Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggung jawab atas 3 IKU yakni:

- ❖ Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)
- ❖ Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)
- ❖ Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)

Uraian Fungsi:

- Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pemeriksaan Log Book di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

4. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana memiliki tanggung jawab atas 2 IKU yakni:

- ❖ Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (persen)
- ❖ Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai)

Uraian Fungsi:

- Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;
- Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

5. Tim Kerja Pelayanan Usaha

Tim Kerja Pelayanan Usaha bertanggung jawab atas 2 IKU yakni:

- ❖ Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)
- ❖ Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)

Uraian Fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

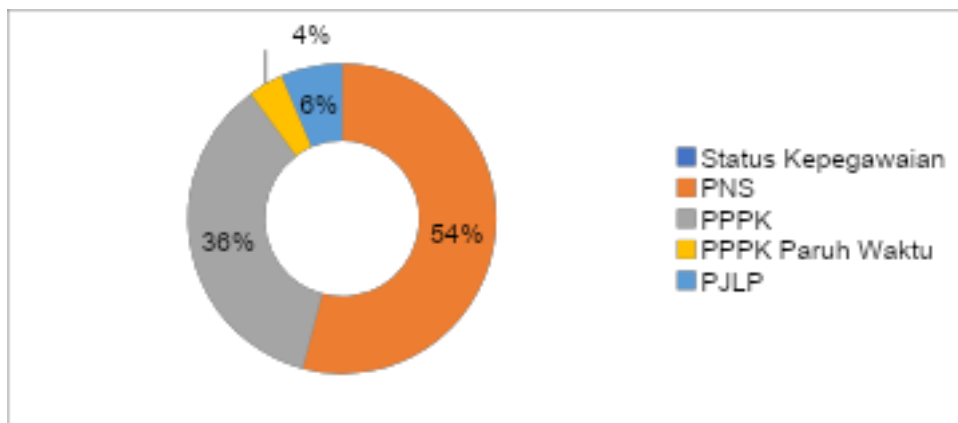
- Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPS Cilacap

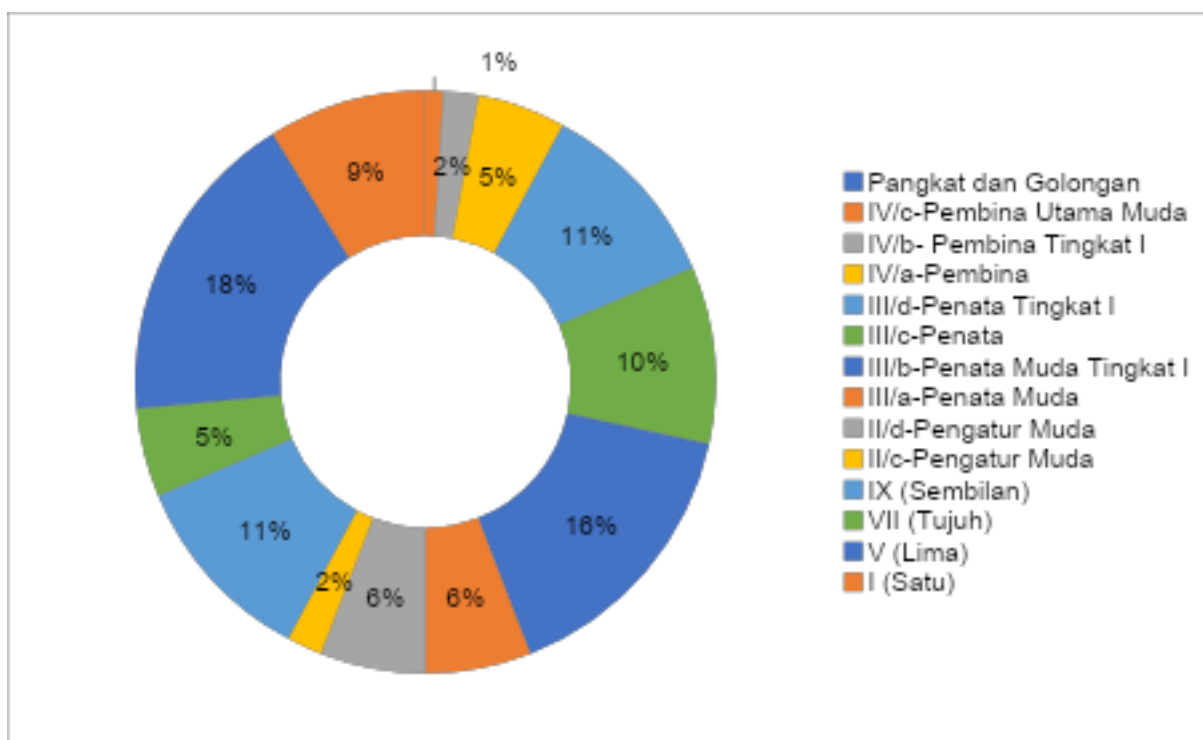
SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan akhir Tahun 2025, jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 109 orang Komposisinya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 59 orang ($\pm 54\%$), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 39 orang ($\pm 36\%$), Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Sebanyak 4 orang ($\pm 4\%$), serta Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 7 orang ($\pm 6\%$) yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Komposisi ASN di PPS Cilacap Tahun 2025

Struktur kepegawaian tersebut masih didominasi oleh PNS. Hal ini menunjukkan peran utama PNS dalam menjaga kesinambungan kelembagaan dan pelaksanaan tugas strategis pelabuhan. Dominasi tersebut sejalan dengan kategori Jabatan Struktural yang diisi oleh PNS dalam menjalankan fungsi manajerial dan pengambilan kebijakan. Di sisi lain, proporsi PPPK yang mencapai lebih dari sepertiga total pegawai mencerminkan penguatan sumber daya manusia pada jabatan fungsional dan teknis. Penguatan ini bersifat adaptif terhadap kebutuhan operasional pelabuhan serta menjadi indikator transformasi manajemen kepegawaian ke arah efektivitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik. Mayoritas PPPK tersebut dapat dikategorikan ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang memerlukan keahlian khusus, serta beberapa di antaranya pada Jabatan Fungsional Umum.



Gambar 3. Komposisi ASN PPS Cilacap berdasarkan Pangkat dan Golongan

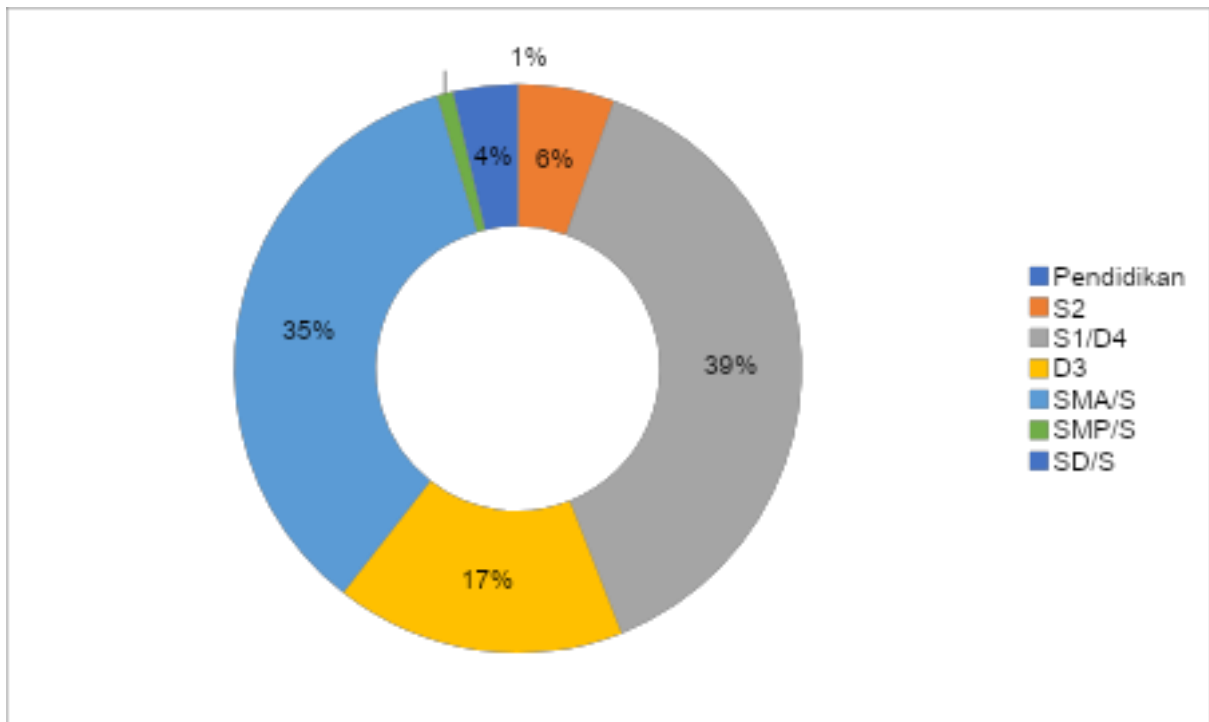
Berdasarkan komposisi pangkat dan golongan pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, dapat diketahui bahwa struktur kepegawaian didominasi oleh pegawai pada golongan III, yang mencerminkan kekuatan sumber daya manusia pada jenjang pelaksanaan lanjutan dan pejabat fungsional menengah.

Pegawai dengan pangkat Penata (III/c) tercatat sebanyak 10 orang ($\pm 10\%$), sedangkan Penata Tingkat I (III/d) dan Penata Muda Tingkat I (III/b) masing-masing sebanyak 11 orang ($\pm 11\%$) dan 16 orang ($\pm 16\%$). Adapun pegawai dengan pangkat Penata Muda (III/a) berkontribusi sebanyak 6 orang ($\pm 6\%$). Secara keseluruhan, kelompok golongan III merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas teknis, administrasi, dan operasional di PPS Cilacap.

Selanjutnya, pegawai pada golongan II juga memiliki proporsi yang cukup signifikan. Pegawai dengan pangkat Pengatur Muda (II/a) dan Pengatur Muda Tingkat I (II/d) masing-masing sebanyak 6 orang ($\pm 6\%$), sementara Pengatur Muda (II/c) sebanyak 2 orang ($\pm 2\%$). Kelompok ini umumnya mendukung kegiatan operasional dan pelayanan teknis di lapangan.

Untuk golongan IV, yang merupakan golongan pembina, proporsinya relatif lebih kecil namun strategis. Pegawai dengan pangkat Pembina (IV/a) tercatat sebanyak 5 orang ($\pm 5\%$), Pembina Tingkat I (IV/b) sebanyak 2 orang ($\pm 2\%$), dan Pembina Utama Muda (IV/c) sejumlah 1 orang ($\pm 1\%$). Pegawai pada golongan ini umumnya menduduki jabatan struktural dan fungsional ahli yang berperan dalam pengambilan keputusan serta pembinaan organisasi.

Selain itu, terdapat pula pegawai dengan klasifikasi jabatan fungsional tertentu pada jenjang V (Lima) sebanyak 18 orang ($\pm 17\%$), IX (Sembilan) sebanyak 11 orang ($\pm 11\%$), VII (Tujuh) sebanyak 5 orang ($\pm 5\%$), dan I (Satu) sebanyak 9 orang ($\pm 9\%$), yang menunjukkan keberagaman jenjang jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi.



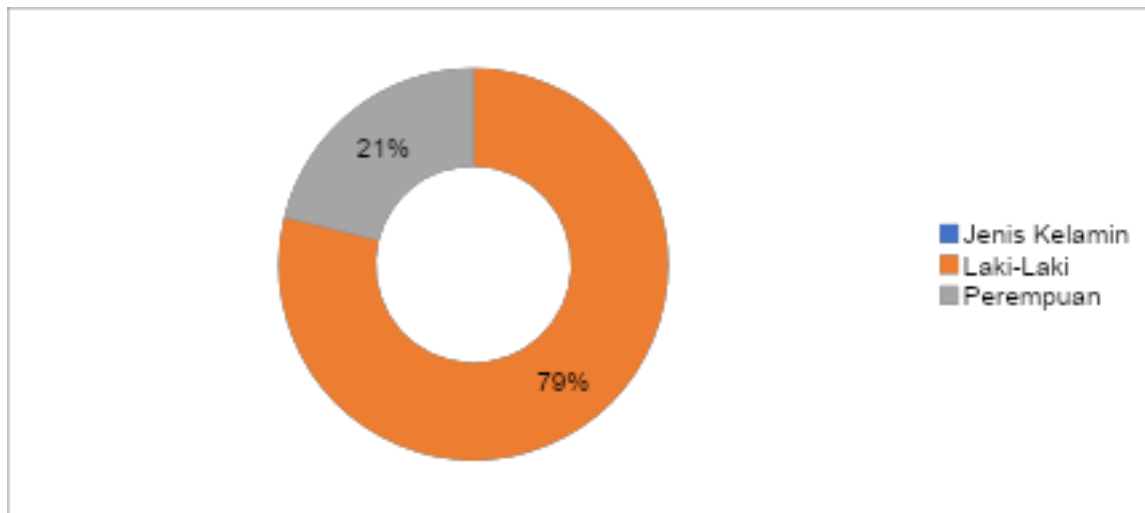
Gambar 4 Diagram Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap

Berdasarkan gambar yang disajikan pada gambar 4, komposisi tingkat pendidikan pegawai dapat dianalisis secara bertingkat. Data menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang pendidikan tinggi, dengan jumlah terbesar di tingkat S1/D4 sebanyak 42 orang ($\pm 39\%$), diikuti secara signifikan oleh lulusan D3 dan SMA/SMK. Adanya sejumlah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 6 orang ($\pm 5\%$). juga menandakan bahwa PPS Cilacap telah memiliki basis tenaga ahli yang mampu mendorong analisis kebijakan dan inovasi di tingkat yang lebih strategis. Sementara itu, representasi pendidikan pada tingkat SMP/S dan SD/S menunjukkan keberagaman latar belakang sumber daya manusia yang ada.

Distribusi pendidikan ini mencerminkan bahwa PPS Cilacap memiliki modal intelektual yang kuat untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis, operasional, dan administratif secara profesional. Dominasi lulusan diploma dan sarjana mengindikasikan kesiapan SDM dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian spesifik serta kemampuan adaptasi terhadap sistem dan teknologi modern. Keberadaan pegawai dengan pendidikan lebih tinggi (S2) juga menjadi aset berharga untuk pengembangan organisasi, perencanaan strategis, dan peningkatan kualitas layanan.

Dengan komposisi seperti ini, instansi dapat lebih mudah menerapkan sistem pelatihan dan pengembangan yang terstruktur, serta mendorong peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu adanya program pembinaan karir dan alih pengetahuan yang menjembatani perbedaan tingkat pendidikan, sehingga

seluruh pegawai dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan bidang dan jenjang masing-masing.



Gambar 5 Diagram perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap

Berdasarkan komposisi jenis kelamin pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dapat diketahui bahwa pegawai laki-laki mendominasi struktur kepegawaian dengan proporsi sebesar 79 persen (86 orang), sedangkan pegawai perempuan sebesar 21 persen (23 orang).

Dominasi pegawai laki-laki tersebut mencerminkan karakteristik kebutuhan organisasi yang sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis, operasional lapangan, dan pelayanan kepelabuhanan yang menuntut kesiapan fisik serta mobilitas tinggi. Sementara itu, keberadaan pegawai perempuan tetap memiliki peran strategis, khususnya dalam mendukung fungsi administrasi, perencanaan, keuangan, serta jabatan fungsional dan struktural tertentu.

Secara keseluruhan, komposisi jenis kelamin pegawai menunjukkan bahwa PPS Cilacap tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan kesesuaian kompetensi dalam penempatan sumber daya manusia, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Pengembangan Pegawai

Pengembangan pegawai dilaksanakan melalui pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui berbagai kegiatan pelatihan, kursus, bimbingan teknis, serta pemberian apresiasi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Adapun maksud dan tujuan pengembangan pegawai meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai guna menunjang kemampuan dalam pelaksanaan tugas serta menumbuhkan motivasi kerja;
- b. Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai pentingnya disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan karier sesuai dengan kompetensi dan kinerja;
- d. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kekompakan melalui pembinaan organisasi kepegawaian.

Pengembangan pegawai dilaksanakan dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, apresiasi, serta workshop yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Selain itu, pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku diberikan hak kepegawaian berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyesuaian ijazah, mutasi, serta bentuk promosi lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai, Kepala Pelabuhan secara rutin memberikan pengarahan dan pembinaan, antara lain melalui pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin dan Kamis serta pada kegiatan rapat pegawai. Selain itu, dilaksanakan rapat pejabat struktural secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan serta merumuskan langkah-langkah pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi.

Untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan kondisi fisik pegawai, setiap hari Jumat dilaksanakan kegiatan olahraga bersama, antara lain jalan santai, bulu tangkis, bola voli, tenis meja, senam pagi, serta kegiatan kerja bakti bersama pengguna jasa.

Pembinaan rohani pegawai dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, seperti pengajian pada bulan suci Ramadan serta kegiatan Halal Bihalal, sebagai upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan keharmonisan antarpegawai.

Kesejahteraan Pegawai

Kesejahteraan pegawai diupayakan melalui berbagai program yang terencana dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kenyamanan, perlindungan, serta kesejahteraan pegawai, baik ASN maupun non ASN. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan mendukung peningkatan kinerja pegawai secara optimal. Adapun upaya yang dilaksanakan antara lain:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi pegawai yang meliputi usaha simpan pinjam, pengelolaan kantin, serta pengembangan aneka usaha lainnya guna mendukung kesejahteraan ekonomi pegawai;
- b. Mendorong pegawai untuk menjadi peserta asuransi kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai upaya perlindungan kesehatan pegawai;
- c. Menyediakan minuman bagi seluruh pegawai selama jam kerja untuk menunjang kenyamanan dan produktivitas kerja;
- d. Menyediakan pakaian kerja beserta kelengkapannya bagi pegawai sebagai bagian dari penunjang pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. Melaksanakan renovasi rumah dinas (mess operator) bagi pegawai guna meningkatkan kenyamanan dan kelayakan hunian; dan
- f. Mengikutsertakan pegawai non ASN dalam program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta upaya meningkatkan rasa aman dan kepastian kerja.

ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, PPS Cilacap memiliki pagu efektif sebesar Rp19.891.883.000 dengan realisasi sebesar Rp19.550.299.772 atau mencapai 98,31%. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar 99,55%, belanja barang sebesar 69,82%, dan belanja modal sebesar 1,20%. Rendahnya realisasi belanja modal dipengaruhi oleh adanya pemblokiran anggaran belanja yang signifikan serta keterlambatan pelaksanaan tender konstruksi, termasuk kegiatan yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri.

RUANG LINGKUP (SISTEMATIKA)

Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2025 merupakan refleksi pelaksanaan tugas dan fungsi PPS Cilacap selama kurun waktu Tahun 2025. Adapun sistematika penyajian Laporan Tahunan PPS Cilacap Tahun 2025 sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF, pada bagian ini disajikan secara ringkas kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selama kurun waktu satu tahun.

2. BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini disajikan informasi umum tentang tugas dan fungsi serta penjelasan secara umum PPS Cilacap, bagan organisasi, sumber daya manusia dan anggaran.
3. BAB II PROGRAM, KINERJA DAN ANGGARAN, pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai visi, misi, rencana dan hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).
4. BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, pada bagian ini menguraikan secara singkat target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja pada awal Tahun.
5. BAB IV KEGIATAN OPERASIONAL PELABUHAN, bagian ini menguraikan capaian-capaian kegiatan, kendala dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung program perikanan tangkap
6. BAB V PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT, bagian ini membahas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan dan upaya pencapaian target kegiatan serta tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir atau menyelesaikan permasalahan tersebut.
7. BAB VI PENUTUP, membahas kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian target serta strategi pemecahan masalah. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan wawasan kepada petugas pelayanan di PTSA terkait dengan materi lanjutan tentang bahasa isyarat dan juga terkait dengan Pentingnya Komunikasi Efektif di Pelabuhan Perikanan.

PROGRAM, KINERJA DAN ANGGARAN

VISI DAN MISI

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni untuk mewujudkan Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera yang tertuang dalam Renstra DJPT Tahun 2025-2029, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menetapkan visi dan misi yang merupakan bagian integral dari Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tersebut.

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu".

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah:

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/lembaga lain

yang beraktifitas di dalam pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi. Dengan mengacu pada tujuan pembangunan perikanan tangkap, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam rangka peningkatan operasional pelabuhan, melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparatur Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, yang ingin dicapai dalam kurun waktu per triwulan Tahun 2025..

Sasaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat;
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab;
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;

TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah menetapkan target-target Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target-target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.492,404
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	30.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.333
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	82
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8

ALOKASI ANGGARAN

Dukungan anggaran yang berasal dari APBN digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung implementasi visi dan misi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Anggaran yang disediakan bersumber dari dana APBN yang terdiri dari Rupiah Murni, PNBP dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 139.365.171.000,-.

Pada Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 136.049.385.000,-. Pada tanggal 24 Februari 2025 terdapat alokasi blokir dalam rangka Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya (Efisiensi Belanja K/L) sebesar Rp. 4.993.631.000 yang terdiri dari alokasi blokir Belanja Barang sebesar Rp. 4.469.631.000 dan alokasi blokir Belanja Modal Rp. 524.000.000.

Kemudian pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat revisi dalam rangka perpindahan pagu anggaran pada RO Cadangan ke dalam kegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi sebesar Rp. 581.694.000 dimana pagu anggaran kegiatan semula sebesar Rp. 1.391.852.000 menjadi Rp.1.973.546.000

Pada tanggal 11 April 2025 terdapat revisi dalam rangka buka blokir anggaran belanja barang dimana jumlah blokir awal sebesar Rp. 4.278.211.000 dan dilakukan buka blokir sebesar Rp. 1.110.887.000, maka total pagu anggaran belanja barang yang masih diblokir sebesar Rp. 3.167.324.000 dan blokir belanja modal sebesar

Tanggal 15 Agustus 2025 terdapat revisi DJA dalam rangka blokir anggaran belanja modal yang semula anggaran yang di blokir sebesar Rp. 524.000.000 menjadi Rp.21.358.842.000

Tanggal 20 November 2025 terdapat revisi buka blokir atas anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 543.036.000 yang semula Rp. 3.167.324.000 menjadi Rp. 2.624.288.000 dan penambahan anggaran untuk alokasi tambahan atas kekurangan Belanja Pegawai di PPS Cilacap sebesar Rp. 1.794.414.000,- sehingga Pagu Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk belanja pegawai menjadi Rp. 11.554.308.000,-.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	119.129.202.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	5.995.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	20.229.974.000
Total		139.365.171.000

REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 19.549.600.272,- (sembilan belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh dua) atau sebesar 14.03%. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 119.815.570.728,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau 85.97% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 139.365.171.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) disebabkan karena adanya sisa belanja bahan beberapa kegiatan yang tidak terserap serta anggaran PHLN untuk kegiatan fisik pembangunan pelabuhan. Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah.

Tabel 3. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
		139.365.171.000	19.549.600.272	14.03
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	119.135.197.000	1.049.166.638	0.88 %
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	119.129.202.000	1.043.296.638	0.88 %
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.656.000	1.656.000	24.88 %

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
		139.365.171.000	19.549.600.272	14.03
ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	6.656.000	1.656.000	24.88 %
BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1.973.546.000	808.102.630	40.95 %
BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.973.546.000	808.102.630	40.95 %
RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	117.149.000.000	233.538.008	0.20 %
RBQ.004	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port	117.149.000.000	233.538.008	0.20 %
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	5.995.000	5.870.000	97.91 %
QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	2.932.000	2.900.000	98.91 %
QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	2.932.000	2.900.000	98.91 %
QKB	Pemantauan produk[Base Line] Lokasi : KAB. CILACAP	3.063.000	2.970.000	96.96 %
QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	3.063.000	2.970.000	96.96 %
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	20.229.974.000	18.500.433.634	91.45 %
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	20.229.974.000	18.500.433.634	91.45 %
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	394.000.000	383.857.003	97.43 %
CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	394.000.000	383.857.003	97.43 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.694.894.000	17.062.558.312	91.27 %
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5.680.000	5.524.000	97.25 %
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.600.000	1.580.000	98.75 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	18.687.614.000	17.055.454.312	91.27 %
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.089.162.000	1.033.990.308	94.93 %
EBB.951	Layanan Sarana Internal	880.150.000	832.616.308	94.60 %
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	209.012.000	201.374.000	96.35 %
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	27.000.000	0	0.00 %
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	27.000.000	0	0.00 %
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.918.000	20.028.011	80.38 %
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.599.000	4.999.011	89.28 %
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.553.000	7.489.000	99.15 %
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	11.766.000	7.540.000	64.08 %

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap melalui upaya pengembangan pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan guna

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai merupakan jenis belanja yang dianggarkan untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan, honorarium, dan lembur. Realisasi belanja pegawai pada Tahun 2024 Rp. Rp. 10.891.406.981,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh satutujuh ratus juta seratus empat puluh lima rupiah) , sedangkan realisasi Tahun 2025 sebesar Rp. 11.502.870.409,- (sebelas milyar lima ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan rupiah). Apabila dilihat dari data tersebut anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan karena ada penambahan 4 orang CPNS, ada pegawai yang mutasi keluar sebanyak 2 orang tetapi ada pegawai mutasi masuk sebanyak 5 orang, terdapat pula 5 orang pegawai yang naik jenjang jabatan fungsional, 11 orang pegawai mendapatkan kenaikan pangkat, 1 orang pegawai alih jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi, dan 3 orang pegawai diangkat kedalam jabatan fungsional tertentu serta terdapat pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala.

BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR

Belanja Operasional dan Pemeliharaan kantor adalah belanja yang dianggarkan untuk membiayai keperluan operasional dan pemeliharaan satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga apa yang menjadi visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Adapun jenis belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 meliputi :

1. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Belanja Langganan Daya dan Jasa
3. Belanja Pemeliharaan Kantor
4. Belanja Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

Realisasi belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.552.583.903,- (lima milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah) atau 77.84% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.133.306.000,- (tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah).

BELANJA MODAL

Belanja modal yang dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2025 meliputi:

1. Civil Works (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil)
2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3. Pengadaan Sarana Internal
4. Pengadaan Prasarana Internal

PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2025 seperti terlihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2025

No	Pembangunan dan Perbaikan Fasilitas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	726.181.000	723.424.000	99.62%
	Pemeliharaan Rambu Berpuncak	95.700.000	95.467.000	99.76%
	Rehabilitasi Bangunan Gudang Lainnya	200.000.000	199.600.000	99.80%
	Bangunan TPI Permanen A	122.220.000	122.149.300	99.94%
	Bangunan TPI Permanen B	40.740.000	39.270.400	96.39%
	Pemeliharaan bangunan gedung kantor permanen	141.860.000	141.851.900	99.99%
	Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pelayanan)	74.736.000	74.566.400	99.77%
	Pemeliharaan Rumah Negara	50.925.000	50.519.000	99.20%

PENGADAAN SARANA

Pengadaan sarana di PPS Cilacap pada tahun 2025 seperti yang terlihat pada tabel 5 berikut:

	Belanja Modal Peralatan Mesin	Nilai PAGU (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Forklift 3,5 Ton, Meja Lipat, Kursi Kerja, Meja Kerja, Sofa seat tamu, Meja dan Kursi Rapat Aula, AC 2PK, AC 1 PK, TV 43 INCH, TV 65 INCH, Scanner, UPS	880.150.000,-	832.616.308,-	94.60

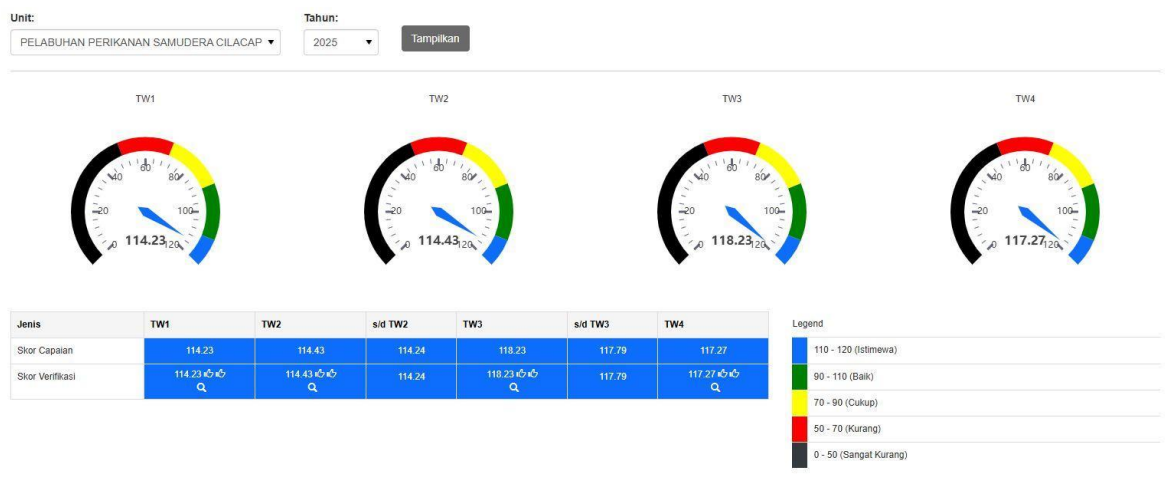
Tabel 6. Daftar Pengadaan Barang Non Operasional Lainnya PPS Cilacap Tahun 2025 Dana Rupiah Murni

	Belanja Barang Operasional Lainnya	Nilai PAGU (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Perawat, Pakaian Dinas PSR, Pakaian Kerja Sopir/Petugas Kebersihan/ Pramubakti, Pakaian Kerja SATPAM & Perlengkapannya serta Atribut Pakaian Dinas	162.164.000,-	162.152.904,-	100

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada Tahun Anggaran 2025, PPS Cilacap menerima mandat untuk melaksanakan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target dari 18 (delapan belas) IKU. SK dan IKU ini menjadi pedoman utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja di lingkungan PPS Cilacap. Memasuki akhir Tahun 2025, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

Capaian tersebut tercermin secara kuantitatif melalui sistem monitoring resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan data sistem, PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 117,27% pada Tahun 2025. Dengan nilai tersebut, PPS Cilacap berhasil masuk dalam kategori “Istimewa” (rentang nilai 110–120), yang ditandai dengan indikator warna biru, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 8 berikut ini:



Gambar 6. Nilai NKO PPS Cilacap Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi PPS Cilacap. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja PPS Cilacap Tahun 2025 dapat tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan IKU Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	CAPAIAN 2025	PERSEN TASE (%)
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Juta)	3.373,57	7.612,89	120
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap (Ton)	27.000	38.540,64	120
3	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap (persen)	100	100	100
		4	Tingkat Kinerja PPS Cilacap (Nilai)	84	92,46	110,07
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap (persen)	85	98,05	115,35
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap (persen)	33	41,56	120
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap (Nilai)	30.1	91,90	120
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700	1.306	120
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0.26	0,45	120
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan PPS Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI PPS Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75.5	89,30	118,28
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	85	100	117,65

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	CAPAIAN 2025	PERSEN TASE (%)
			Perbaikan Kinerja PPS Cilacap (Persen)			
		12	Nilai PM SAKIP PPS Cilacap (Nilai)	88	100	113,64
		13	Indeks Profesionalitas ASN PPS Cilacap (Indeks)	87	90,71	104,26
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap (Persen)	76	100	120
		15	Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap (Persen)	81	100	120
		16	Nilai IKPA PPS Cilacap (Nilai)	92	85,68	93,13
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap (Nilai)	71,5	93,57	120
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap (Nilai)	88.5	93,76	105,94

Berikut adalah penjelasan capaian IKU Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025:

SASARAN KEGIATAN 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap

Sasaran kegiatan Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPS Cilacap (Juta)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah

Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Indikator Penerimaan PNBP di PPS Cilacap adalah Nilai PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Pungutan PNBP Cilacap didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Kegiatan pelayanan jasa di PPS Cilacap adalah sebagai berikut:

- pelayanan jasa tambat labuh;
- pelayanan jasa air;
- pelayanan jasa cold room dan freezer;
- pelayanan jasa kendaraan (crane, truck refrigerator, dump truck dll);
- pelayanan jasa alat (gerobak, penghancur es, dll);
- pelayanan jasa penggunaan tanah dan/atau bangunan;
- pelayanan jasa penumpukan barang/penjemuran jaring/ikan;
- pelayanan jasa pas masuk;
- pelayanan jasa kebersihan pelabuhan;
- pelayanan jasa penggunaan sarana dan prasarana;
- pelayanan jasa listrik;
- pelayanan jasa dock.

IKU ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 3.373,56 juta rupiah. Adapun capaian Nilai PNBP Non-SDA di PPS Cilacap pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 7.612,89 juta rupiah, sebagaimana tersaji pada Tabel 8.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Juta)	3.373.57	7,612,89	225,56

Tabel 8. Capaian IKU 1 Tahun 2025

Penerimaan PNBP PPS Cilacap terbesar masih berasal dari penerimaan tambat sebesar Rp. 3.081.658.384,- dan penerimaan terbesar kedua berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp. 2.768.992.597,-

SASARAN KEGIATAN 2

Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat

Sasaran kegiatan Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap

Indikator ini menunjukkan jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di PPS Cilacap dalam bentuk basah di PPS Cilacap. IKU ini memiliki periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari PPS Cilacap dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun secara harian. Capaian realisasi volume produksi sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar 38.540,64 ton dari target sebesar 27.000 ton.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Cilacap (ton)	27.000	38.540,64	142,74

Tabel 9 Capaian IKU 2 Tahun 2025

Pada Tahun 2025, kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Cilacap mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang tercatat, realisasi produksi mencapai

38.540,64 ton, angka yang jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 27.000 ton. Pencapaian ini merepresentasikan 142,74% dari target, yang menunjukkan performa operasional yang luar biasa. Volume produksi pada Tahun 2025 ini didominasi oleh jenis ikan seperti Cumi Karet, Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, dan Layur.

SASARAN KEGIATAN 3

Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan memiliki fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan diarahkan untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa bagi kapal perikanan serta jasa terkait lainnya di lingkungan pelabuhan perikanan.

Selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan, prosedur jasa penggunaan tanah dan bangunan meliputi tahapan penerimaan permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan. Dalam hal ini, Petugas Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian pengajuan permohonan, kelengkapan persyaratan administrasi, serta analisis proposal yang diajukan oleh pemohon. Verifikasi tersebut juga mempertimbangkan ketersediaan tanah dan kesesuaiannya dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap (persen)	100	100	100

Tabel 10 Capaian IKU 3 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 10 Capaian IKU 3 Tahun 2025, persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mencapai 100 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh permohonan perusahaan yang diterima pada Triwulan IV Tahun 2025 telah diproses secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah permohonan perusahaan di pelabuhan perikanan yang dianalisis dan dievaluasi sepanjang Tahun 2025 tercatat sebanyak 134 permohonan. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 19,28 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencatat sebanyak 166 permohonan. Penurunan jumlah permohonan tersebut dipengaruhi oleh adanya periode jatuh tempo perjanjian perusahaan serta perbedaan jangka waktu perjanjian yang berlaku. Meskipun demikian, seluruh permohonan perusahaan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tingkat penyelesaian sebesar 100 persen.

Capaian kinerja tersebut mengindikasikan efektivitas pelaksanaan proses analisis dan evaluasi permohonan perusahaan, yang didukung oleh koordinasi internal yang baik, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, serta penerapan prosedur kerja yang konsisten. Dengan tercapainya target secara optimal, kinerja IKU ini mencerminkan kualitas pelayanan kepelabuhanan yang andal serta berkontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Tingkat Kinerja PPS Cilacap

Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi :

1. administrasi dan sistem informasi;
2. fasilitas pelabuhan perikanan;
3. pelayanan umum; dan
4. investasi dan industri.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Tingkat Kinerja PPS Cilacap (Nilai)	84	92,46	110,07

Tabel 11 Capaian IKU 4 Tahun 2025

Capaian kinerja operasional PPS Cilacap pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai 92,46 berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja (EVKIN) yang mencakup 27 komponen penilaian. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan kinerja pelabuhan dalam berbagai aspek operasional, yang didorong oleh meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, tingginya volume produksi perikanan yang didaratkan, serta optimalnya pelayanan tambat-labuh kapal. Selain itu, konsistensi dalam pengiriman data melalui sistem PIPP dan peningkatan efektivitas distribusi BBM kepada pelaku usaha perikanan turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai kinerja secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian nilai EVKIN 92,46 ini tidak hanya menegaskan efektivitas pengelolaan operasional pelabuhan, tetapi juga mencerminkan sinergi yang baik antara pelayanan, produktivitas, dan dukungan sistem informasi dalam mendukung kelancaran aktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5

Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) yang diterbitkan dan jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan di PPS Cilacap.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2024	Realisasi 2025	Capaian (%)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap (persen)	85	98,05	115,35

Tabel 12 Capaian IKU 5 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui, Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap pada Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dengan realisasi sebesar 98,05% dari target yang ditetapkan yaitu 85%, sehingga menghasilkan persentase capaian melampaui target sebesar 115,35%. Capaian ini dipengaruhi secara signifikan oleh meningkatnya

intensitas aktivitas armada perikanan di pelabuhan sepanjang tahun 2025, yang berimplikasi langsung pada produktivitas layanan administratif kesyahbandaran. Peningkatan volume kerja tersebut tercermin pada tingginya frekuensi penerbitan dokumen vital, seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB), STBLKK, serta SHTI. Keberhasilan instansi dalam mengakomodasi lonjakan aktivitas kapal tersebut dengan tetap menjaga akurasi dan kecepatan layanan membuktikan bahwa tata kelola operasional pelabuhan telah berjalan secara optimal, responsif, dan akuntabel dalam mendukung konektivitas serta legalitas usaha perikanan di wilayah Cilacap.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, indikator ini diukur dengan menunjukkan Persentase perbandingan antara pengembangan fasilitas dengan masterplan pada PPS Cilacap.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap (persen)	33	41,56	124,94

Tabel 13 Capaian IKU 6 Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap tercatat sebesar 124,94%. Berdasarkan Master Plan PPS Cilacap, terdapat 52 fasilitas yang perlu dilakukan pengendalian guna menjaga kondisi fasilitas tetap optimal. Adapun jumlah fasilitas yang telah dilakukan pengendalian sebanyak 22 unit.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

Nilai pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus:

1. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan
2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Dalam mendukung hal tersebut, dilakukan melalui penggunaan aplikasi SELARASKAN yang merupakan sistem informasi berbasis WEB dan berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diupdate berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Nilai pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap (Nilai)	30,1	91,90	305,32

Tabel 14 Capaian IKU 7 Tahun 2025

Berdasarkan Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B.144/DJPT.4/PI.310/I/2026 Tanggal 12 Januari 2026 Hal Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan IV TA. 2025 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, dapat diketahui bahwa capaian kinerja PPS Cilacap dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dengan perolehan skor rata-rata 91,90 PPS Cilacap berhasil mempertahankan predikat Sangat Baik. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap indikator penilaian, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam pengelolaan kebersihan, tata lingkungan, dan kualitas pelaporan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

SASARAN KEGIATAN 4

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh PPS Cilacap. Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (surat ukur dan/atau sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh PPS Cilacap. IKU ini merupakan IKU dengan periode pengukuran triwulanan.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	700	1.306	186,67

Tabel 15 Capaian IKU 8 Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan hasil yang sangat baik. Target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 700 kapal berhasil dilampaui dengan realisasi sebanyak 1.306 kapal, atau mencapai persentase capaian sebesar 186,67% dari target yang telah ditentukan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan, khususnya Surat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), berjalan dengan optimal di PPS Cilacap.

Indikator ini mengukur jumlah dokumen kapal perikanan, seperti surat ukur dan/atau sertifikat kelaikan kapal, yang diterbitkan oleh PPS Cilacap sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan keselamatan dan kelayakan operasional kapal. Sebagai indikator yang diukur secara triwulanan, capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 9

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan persentase kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini memiliki periode pengukuran semesteran.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	0,45	173,08

Tabel 16 Capaian IKU 9 Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 16, capaian kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPS Cilacap telah dilaksanakan secara optimal dengan realisasi sebesar 0,45 dari target 0,26, yang menghasilkan persentase capaian sebesar 173,08%. Keberhasilan ini didorong oleh kebijakan migrasi kapal izin daerah (di atas 12 mil) ke izin kewenangan pusat, yang secara langsung memicu peningkatan kepatuhan terhadap standarisasi sertifikasi awak kapal perikanan serta kepemilikan Buku Kapal Perikanan. Dengan realisasi yang melampaui target tersebut, indikator ini berhasil mencapai predikat telah terealisasi dan menunjukkan progresivitas yang kuat dalam penjaminan aspek legalitas serta kompetensi awak kapal.

SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan PPS Cilacap

Sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan PPS Cilacap. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut;

INDIKATOR KINERJA UTAMA 10

Nilai PM Pembangunan ZI PPS Cilacap (yang telah dinilai WBK)

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan percepatan pencapaian sasaran, khususnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja PPS Cilacap pada tahun 2025.

Indikator ini didasarkan pada hasil penjumlahan nilai pembangunan Zona Integritas yang mencakup komponen pengungkit dan komponen hasil dengan penilaian yang dilakukan secara tahunan dan mandiri. Dengan demikian, pengukuran ini diharapkan dapat mendorong percepatan transformasi tata kelola pelabuhan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan prima bagi masyarakat.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Nilai PM Pembangunan ZI PPS Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5	89,30	118,28

Tabel 17 Capaian IKU 10 Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 17, realisasi IKU 10 mengenai Nilai PM Pembangunan ZI di PPS Cilacap pada tahun 2025 berhasil mencapai angka 89,30, atau setara dengan 118,28% dari target yang ditetapkan sebesar 75,5. Capaian yang melampaui target ini terjadi karena pada tahun 2025, PPS Cilacap dituntut untuk secara mandiri mempertahankan nilai pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui pelaksanaan penilaian mandiri pascaperolehan penghargaan predikat WBK Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi dan komitmen kuat seluruh jajaran pelabuhan dalam menjaga integritas serta kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani secara berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap (Persen)

Indikator ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik

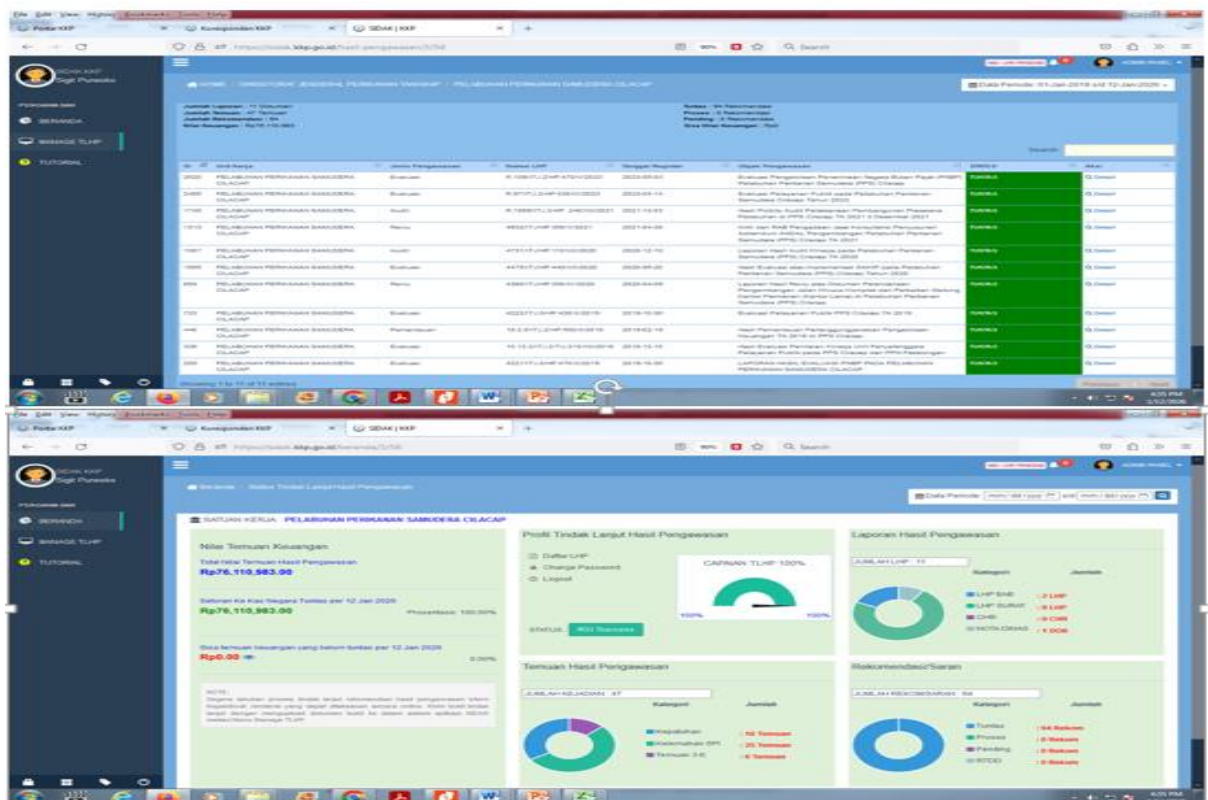
bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap (Persen)	85	100	117,65

Tabel 18 Capaian IKU 11 Tahun 2025

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap tercapai sebesar 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi SIDAK KKP sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 7 Screen shot Aplikasi SIDAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA 12

Nilai PM SAKIP PPS Cilacap

Indikator ini diukur melalui Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%).

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Nilai PM SAKIP PPS Cilacap (Nilai)	88	100	113,64

Tabel 19 Capaian IKU 12 Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 19, realisasi IKU 12 mengenai Nilai PM SAKIP di PPS Cilacap pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan mencapai angka 100, yang berarti telah memenuhi 113,64% dari target yang ditetapkan sebesar 88. Keberhasilan ini selaras dengan capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan yang juga tercapai sebesar 100%, di mana seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti secara tuntas. Sinergi antara akuntabilitas kinerja yang maksimal dan responsivitas terhadap rekomendasi pengawasan ini menegaskan bahwa PPS Cilacap telah menjalankan sistem manajemen pemerintahan yang sangat transparan, efisien, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 13

Indeks Profesionalitas ASN PPS Cilacap

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan

kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indikator ini diperoleh dari nilai yang diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan merupakan IKU dengan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh seluruh ASN PPS Cilacap sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa surat hasil pengukuran IP ASN dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan nilainya dapat diakses melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/250>.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan target 87 (delapan puluh tujuh) untuk nilai Indeks Profesional ASN PPS Cilacap. Sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, nomor B. 2761 /DJPT.1/TU.410/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang Capaian Pengukuran IKU IP ASN Semester I Tahun 2025 lingkup DJPT, capaian kinerja PPS Cilacap dalam penilaian indeks profesionalisme adalah indeks 90,71

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN PPS Cilacap (Indeks)	87	90,71	104,26

Tabel 20 Capaian IKU 13 Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 20, realisasi IKU 13 mengenai Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dengan capaian sebesar 90,71. Angka ini berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar yaitu 87, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja mencapai 104,26%. Keberhasilan melampaui target ini mengindikasikan bahwa PPS Cilacap telah berhasil mengelola sumber daya manusianya secara efektif, memastikan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja ASN berada pada level profesional yang tinggi guna mendukung optimalisasi layanan publik di pelabuhan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah melalui proses pengadaan barang/jasa, di mana pemerintah secara terbuka mengumumkan pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) merepresentasikan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), dengan nilai indikator diperoleh dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri yakni pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu nonpengadaan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1), PPS Cilacap telah beberapa kali melakukan revisi dan penyesuaian dalam perencanaan anggaran yang seluruhnya ditindaklanjuti dengan perubahan RUP, dan seluruh nilai pengadaan sebesar Rp6,382,333,600,00 telah diumumkan secara penuh di SiRUP sehingga capaian persentase RUP terumumkan mencapai 100%.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap (Persen)	76	100	131,58

Tabel 21 Capaian IKU 14 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 21, pada tahun 2025, PPS Cilacap menunjukkan performa tata kelola pengadaan yang sangat baik dengan mencatatkan persentase capaian pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar 100% pada aplikasi SIRUP. Dari total pagu belanja pengadaan senilai Rp6,382,333,600,00. Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang sempurna terhadap regulasi pengadaan barang/jasa serta efektivitas manajemen anggaran dalam mendukung operasional pelabuhan sepanjang tahun anggaran 2025.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 15

Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap

Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur kinerja yang merepresentasikan tingkat kepatuhan Satuan Kerja (Satker) PPS Cilacap dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tingkat kepatuhan tersebut diukur berdasarkan akumulasi nilai dari beberapa unsur penilaian, yaitu tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dengan bobot sebesar 12,5 persen, tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN atas pengadaan belanja modal yang telah dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan bobot sebesar 25 persen, tersedianya usulan penghapusan BMN terhadap aset dengan kondisi rusak berat baik kepada pengguna barang maupun pengelola barang dengan bobot sebesar 25 persen, penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung dengan Berita Acara Serah Terima atau Berita Acara Pemakaian dengan bobot sebesar 25 persen, serta ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan BMN semesteran dan tahunan dengan bobot sebesar 12,5 persen.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap (Persen)	81	100	123,45

Tabel 22 Capaian IKU 15 Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 22 Capaian IKU 15 Tahun 2025, persentase pengelolaan BMN di PPS Cilacap menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2025, target capaian IKU 15 ditetapkan sebesar 81 persen, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai mencapai 100 persen. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 123,45 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Tingginya capaian tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan yang optimal dalam pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan kebutuhan BMN, penatausahaan, penggunaan, penghapusan, serta pelaporan BMN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini juga menunjukkan efektivitas pengelolaan administrasi BMN di PPS Cilacap serta komitmen unit kerja dalam memenuhi seluruh unsur penilaian IKU 15 secara konsisten dan berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 16

Nilai IKPA PPS Cilacap

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran diperoleh dari konversi nilai indikator dan bobot indikatornya, terdapat 8 (delapan) indikator antara lain revisi DIPA, deviasi RDP, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode semesteran, yang dilaksanakan oleh PPS Cilacap sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Nota Dinas penyampaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 Tanggal 10 Januari 2026 Hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target nilai 92 (sembilan puluh dua). Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PPS Cilacap (Nilai) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Nilai IKPA PPS Cilacap (Nilai)	92	85,68	93,13

Tabel 23 Capaian IKU 16 Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian IKPA Tahun 2025 pada tabel 23, PPS Cilacap memperoleh nilai sebesar 85,68 atau mencapai 93,13% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya kinerja pada beberapa indikator utama. Pada indikator Penyerapan Anggaran, PPS Cilacap memperoleh nilai 7,05 dari bobot maksimal 20, yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pelaksanaan beberapa kegiatan serta pemblokiran anggaran. Pada indikator Belanja Kontraktual, PPS Cilacap memperoleh nilai 8,70 dari bobot maksimal 10, yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kontrak yang terkonsentrasi pada akhir tahun sebagai dampak dari revisi pembukaan blokir anggaran dengan rentang waktu

pelaksanaan yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya nilai komponen akselerasi kontrak dan belanja modal.

Selain faktor metodologis, capaian IKPA Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut berdampak pada adanya penyesuaian dan pemblokiran anggaran belanja, yang secara langsung memengaruhi pola penyerapan dan pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Menindaklanjuti kondisi tersebut serta dinamika pelaksanaan anggaran selama Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Nomor S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penyesuaian Data dan Perhitungan IKPA Tahun Anggaran 2025, dalam rangka penerapan prinsip fairness treatment melalui penyesuaian penilaian pada indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, dan Capaian Output secara nasional.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 17

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan secara terintegrasi oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian/Lembaga negara dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) melalui aplikasi SMART DJA. Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi berfokus pada penilaian penggunaan anggaran untuk kegiatan atau program serta pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat mengukur perubahan yang dialami oleh pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat dari program Kementerian/Lembaga. Sementara itu, Aspek Konteks mengevaluasi kualitas informasi dalam dokumen RKA-KL, termasuk relevansinya dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Indikator kinerja ini memiliki tingkat validitas output kendali yang rendah dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maksimisasi. Pelaporannya dilakukan secara tahunan, di mana pencapaian indikator harus didukung oleh bukti berupa Surat Penyampaian Nilai Kinerja Anggaran dari Sekretariat DJPT. Pada Tahun 2025, PPS Cilacap menargetkan nilai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) sebesar 71,5 (tujuh puluh satu koma lima). Capaian hingga Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan realisasi nilai NKPA sebesar 93,57, yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap (Nilai)	71,5	93,57	130,87

Tabel 24 Capaian IKU 17 Triwulan IV Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 24, capaian IKU 17 mengenai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap pada Tahun 2025 menunjukkan performa yang baik dengan melampaui target yang ditetapkan. Dengan realisasi nilai sebesar 93,57 terhadap target triwulanan sebesar 71,5, PPS Cilacap berhasil mencatatkan persentase capaian hingga 130,87%. Hasil ini mengindikasikan kualitas perencanaan anggaran yang sangat efektif dan akurat, di mana realisasinya jauh melampaui ekspektasi target minimum yang ditentukan untuk periode ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 18

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM di PPS Cilacap dilakukan oleh Petugas Pelayanan Publik PPS Cilacap secara periodik setiap triwulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diukur melalui skala Likert. Skala Likert digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik, di mana responden diminta menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang disajikan melalui beberapa pilihan jawaban. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner menggunakan aplikasi SKM serta wawancara tatap muka dengan pengguna layanan.

Variabel pengukuran dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada sembilan unsur yang ditetapkan dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu: (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya atau tarif, (5) produk layanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) sarana dan prasarana, serta (9) penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Target dan Realisasi Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap (Nilai)	88,5	93,76	105,94

Tabel 25 Capaian IKU 18 Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 25, SKM pada PPS Cilacap menunjukkan performa yang baik dengan nilai realisasi sebesar 93,76 terhadap target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 81,5. Hasil ini merepresentasikan persentase capaian kinerja sebesar 105,94%, di mana indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data sebanyak 81 responden dan 11 jenis pelayanan dengan predikat kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan publik di PPS Cilacap telah melampaui standar yang direncanakan dan mampu memenuhi ekspektasi pengguna jasa pelabuhan secara optimal pada periode ini.

KEGIATAN OPERASIONAL

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL DAN KAPAL BONGKAR

Frekuensi kunjungan kapal pada periode tahun 2025 sebanyak 18.242 kali, turun 9.31 % bila dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 20.114 kali sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Perbandingan Frekuensi Kunjungan Kapal Tahun 2024 – 2025

No.	Bulan	Tahun/kapal		Kenaikan / Penurunan (%)
		2024	2025	
1	Januari	1.904	1.469	-22,84
2	Februari	1.822	1.295	-28,92
3	Maret	1.588	1.402	-11,71
4	April	1.695	1.260	-25,66
5	Mei	1.689	1.385	-17,99
6	Juni	1.564	1.465	-6,32
7	Juli	1.498	1.733	15,68
8	Agustus	1.719	1.686	-1,92
9	September	1.617	1.561	-3,46
10	Oktober	1.761	1.672	-5,05
11	November	1.561	1.640	5,06
12	Desember	1.696	1.674	-1,29
Jumlah		20.114	18.242	-9,31

Dari jumlah frekuensi kunjungan kapal rata-rata didominasi oleh kapal dengan ukuran 0-10 GT dengan pola penangkapan one day fishing, sebanyak 11.691 kapal. kemudian diikuti oleh kapal-kapal ukuran 21-30 GT sebanyak 5.077 kapal.

Tabel 27. Perbandingan Kapal Bongkar Periode Tahun 2024 - 2025

No.	Bulan	Tahun/kapal		Kenaikan / Penurunan (%)
		2024	2025	
1	Januari	1.499	1.047	-30.15
2	Februari	1.372	878	-36.00
3	Maret	1.322	1.262	-4.53
4	April	1.320	769	-41.74
5	Mei	1.423	1.175	-17.43
6	Juni	1.370	1.268	-7.44
7	Juli	1.212	1.383	14.11
8	Agustus	1.510	1.455	-3.64
9	September	1.463	1.266	-13.46
10	Oktober	1.532	1.411	-7.89
11	November	1.308	1.364	4.28
12	Desember	1.427	1.389	-2.66
Jumlah		16.758	14.667	-1.79

Jumlah kapal bongkar pada periode tahun 2025 sebanyak 14.667 kapal mengalami penurunan sebesar 1.79 % bila dibandingkan dengan jumlah kapal bongkar tahun 2024 yaitu sebanyak 16.758 kapal sebagaimana terlihat pada Tabel 27.

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

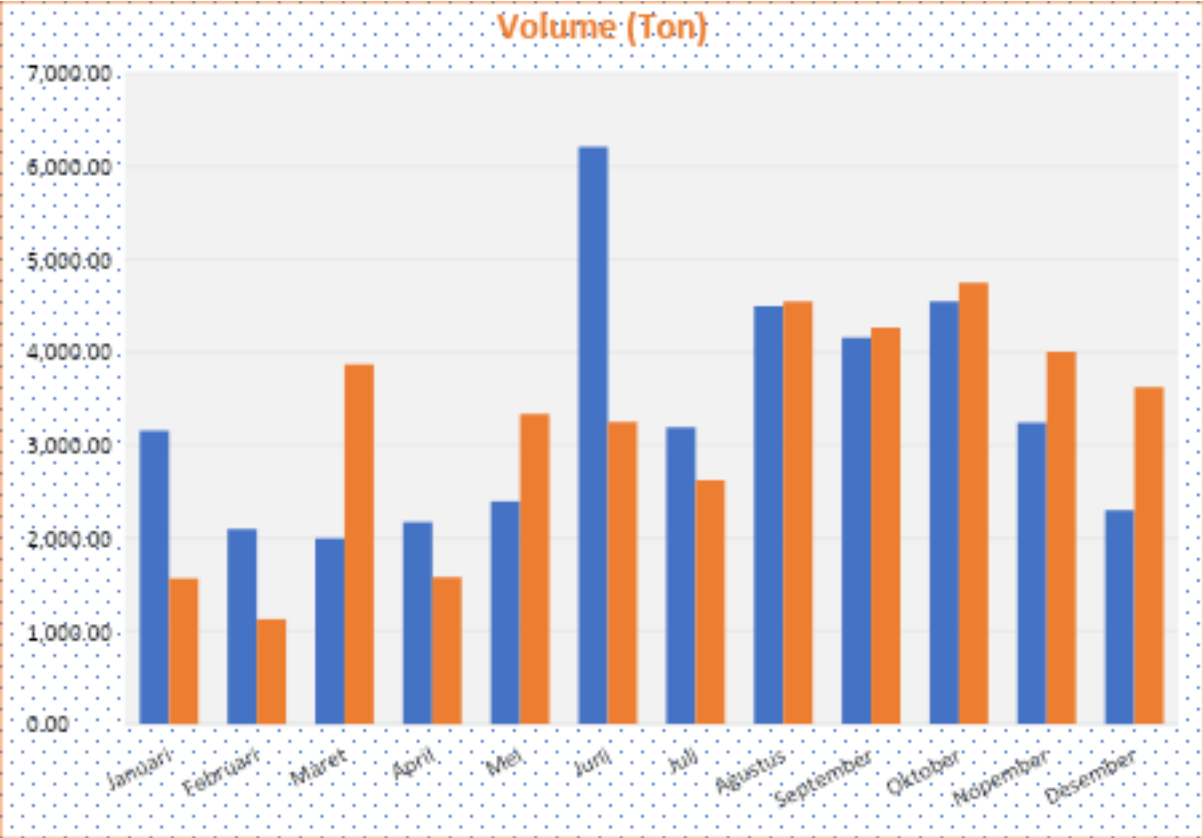
VOLUME PRODUKSI

Produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terdiri dari ikan yang didaratkan dari kapal-kapal yang bongkar di PPS Cilacap maupun ikan yang berasal dari luar Cilacap yang diangkut ke PPS Cilacap dengan angkutan darat untuk dipasarkan ke konsumen di Cilacap.

Produksi ikan dari kapal bongkar merupakan ikan hasil tangkapan kapal perikanan dengan alat tangkap pancing, jaring insang, pukat cincin, dan pukat Tarik yang beroperasi di WPP 573. Produksi ikan yang didaratkan pada tahun 2025 sebesar 38.540,64 ton atau mengalami penurunan 3,57 %, apabila dibandingkan dengan volume ikan yang didaratkan pada tahun 2024 sebesar 39.970,13 ton. Produksi ikan perbulan tahun 2024 dan 2025 di PPS Cilacap dapat dilihat pada Grafik 1.

Penurunan produksi ikan pada tahun 2025, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan musim penangkapan, kondisi cuaca dan oseanografi yang kurang mendukung aktivitas melaut, serta fluktuasi sumber daya ikan. Selain itu, penundaan keberangkatan kapal

setelah pascaperayaan tertentu serta meningkatnya biaya operasional penangkapan juga berkontribusi terhadap penurunan intensitas melaut . Produksi ikan dominan PPS Cilacap dapat dilihat pada Tabel 28.



Grafik 1. Produksi Ikan Tahun 2024 dan 2025

Tabel 28. Produksi Ikan Dominan PPS Cilacap

No	Produksi Ikan Dominan	Tahun 2024 (Ton)	Tahun 2025 (Ton)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Tuna / <i>Tunas</i>	6.369,36	10.594,24	66,33
2	Cakalang / <i>Skipjack tuna</i>	14.195,95	6.274,5	-55,8
3	Cumi Karet / <i>Squid</i>	15.232,35	10.457,56	-31,34
4	Paruh Panjang / <i>Bill fish</i>	339,06	879,28	159,32
5	Udang / <i>Shrimp</i>	208,74	102,15	-51,06
6	Layur / <i>Hairtail</i>	669,82	2.493,88	272,32
7	Ikan lainnya / <i>Others fishes</i>	2.954,85	7.739,03	161,91
TOTAL		39.970,13	38.540,64	-3,58

Sedangkan total volume ikan yang diangkut melauai darat tahun 2025 sebanyak 979,10 Ton turun -52,39 % bila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan volume 2.056,55 Ton. Jenis ikan dominan yang diangkut melalui darat terdiri dari : Patin, Nila, Cumi - cumi, Kembung, Dogol.

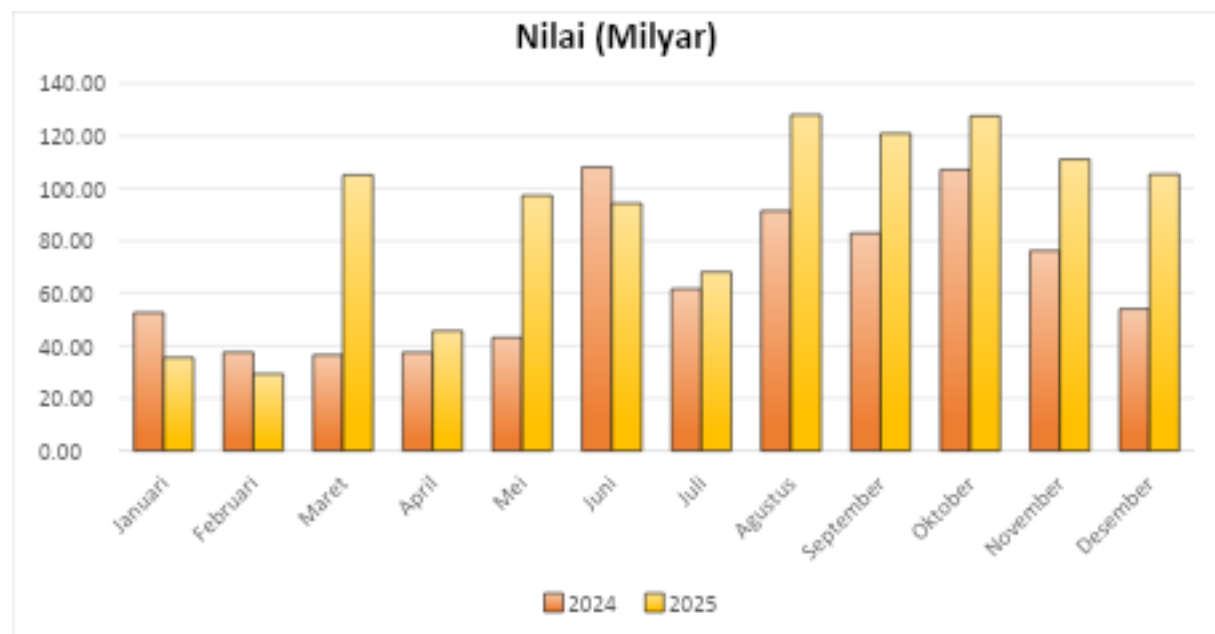
Total produksi yang ditangani di PPS Cilacap pada tahun 2025 seperti terlihat pada tabel 29 berikut:

Tabel 29. Total Produksi Ikan Yang Ditangani Di PPS Cilacap Tahun 2024 dan 2025

No	Kegiatan	2024(ton)	2025 (ton)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pembongkaran Dari Kapal	39.970,13	38.540,64	-3,57
2	Diangkut Lewat Darat	2.056,55	979,10	-52,39
TOTAL		42.026,68	39.519,74	-5,96

NILAI PRODUKSI

Nilai produksi ikan adalah nilai produksi perikanan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Nilai produksi yang didaratkan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 35,44 %, dimana tahun 2025 sebesar Rp. 1.067.832.213.540,- apabila dibanding dengan nilai produksi pada periode tahun 2024 sebesar Rp. 788.402.998.000,- . Nilai produksi ikan perbulan tahun 2024 dan 2025 di PPS Cilacap ditunjukkan pada Grafik 2 berikut ini.



Grafik 2. Nilai Produksi Ikan Tahun 2024 Dan 2025

Total produksi yang didaratkan pada tahun 2025 sebesar 38.540,64 ton dengan harga rata-rata per Kg adalah sebesar Rp. 27.706,- mengalami kenaikan sebesar 40,46 % bila dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2024 sebesar Rp. 19.724,- per Kg. Hal ini disebabkan hasil tangkapan ikan yang bernilai tinggi meningkat di tahun 2025, antara lain

Tuna dan layur yang sangat signifikan, disamping juga mutu ikan yang semakin baik sehingga meningkatkan nilai jual ikan. Nilai produksi jenis dominan di PPS Cilacap pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Nilai Produksi Ikan Dominan PPS Cilacap periode tahun 2024 – 2025

No	Produksi Ikan Dominan	Tahun 2024 (Juta)	Tahun 2025 (Juta)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Tuna / <i>Tunas</i>	179.112,68	405.659,69	126,48
2	Cakalang / <i>Skipjack tuna</i>	237.207,38	90.386,09	-61,85
3	Cumi Karet/ <i>Squid</i>	291.191,52	323.012,54	-10,92
4	Paruh Panjang / <i>Bill fish</i>	10.277,91	26.596,62	158,77
5	Udang / <i>Shrimp</i>	11.634,98	9.044,47	-22,26
6	Ikan lainnya / <i>Others fishes</i>	58.978,50	213.132,80	261,37
TOTAL		788.403,00	1.067.832,21	35,44

PEMERIKSAAN KAPAL BONGKAR

Untuk mewujudkan peranan penting dan strategis dalam pembangunan perikanan nasional terutama perikanan tangkap, hasil perikanan Indonesia harus dapat memenuhi persyaratan untuk dapat menjamin mutu dan keamanan yang diinginkan konsumen.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka kegiatan Inspeksi Pembongkaran Ikan tidak lagi dilaksanakan sebagai pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan, namun inspeksi pembongkaran ikan dilaksanakan sebagai bahan control dokumen kapal yang melakukan kegiatan bongkar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kapal Bongkar selama kurun waktu tahun 2025 dilakukan sebanyak 3.462 unit kapal dari 3.462 unit kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya, atau Presentase kapal yang diinspeksi mencapai 100 %. Secara rinci disampaikan pada Tabel 31 berikut ini.

Tabel 31. Perbandingan Jumlah Kapal Bongkar dan Kapal yang Diinspeksi Periode Tahun 2024 - 2025.

No	Bulan	Tahun 2024		Rasio (%)	Tahun 2025		Rasio (%)
		Jumlah Kapal Bongkar	Jumlah Kapal yang di Inspeksi		Jumlah Kapal Bongkar	Jumlah Kapal yang di Inspeksi	
1	Januari	234	234	100,00	155	155	100,00
2	Februari	189	189	100,00	115	115	100,00
3	Maret	231	231	100,00	475	475	100,00
4	April	242	242	100,00	132	132	100,00
5	Mei	186	186	100,00	313	313	100,00
6	Juni	426	426	100,00	386	386	100,00
7	Juli	236	236	100,00	270	270	100,00
8	Agustus	369	369	100,00	400	400	100,00
9	September	358	358	100,00	302	302	100,00
10	Oktober	386	386	100,00	312	312	100,00
11	November	283	283	100,00	295	295	100,00
12	Desember	290	290	100,00	307	307	100,00
Jumlah		3.430	3.430	100,00	3.462	3.462	100,00

Bila dibandingkan dengan periode tahun 2024 dan 2025, maka rasio perbandingan pelaksanaan inspeksi pembongkaran sama 100%.

PELAKSANAAN SISTEM PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN (PIPP)

PIPP adalah sistem aplikasi yang diperuntukkan untuk mengolah data dan menginformasikan kegiatan pelabuhan perikanan secara menyeluruh. Informasi yang disampaikan berasal dari kegiatan di pelabuhan perikanan yang dibagi dalam tiga periode waktu, yaitu harian, bulanan dan situasional. Sumber data berasal dari stakeholder perikanan yang ada di lingkungan pelabuhan dan atau lingkungan sekitar wilayah pelabuhan baik berupa data primer (data yang diambil petugas PIPP dari sumber data langsung) maupun data sekunder (data yang diambil dari unit kerja lain atau instansi terkait) di lokasi pelabuhan perikanan.

Hasil pengumpulan dan pencatatan data di-entri oleh operator dan diolah menjadi bahan laporan. Data harian dan situasional dikirim secara rutin setiap hari ke server database <http://www.pipp.djpt.kkp.go.id..> meliputi :

1. Data harian
 - Operasional kapal masuk pelabuhan (Form H1)
 - Produksi ikan perkapal (Form H2)
 - Pemasaran masuk dan keluar (Form H3)
 - Harga ikan ditingkat pedagang (Form H4)
 - Operasional kapal keluar pelabuhan (Form H5)

2. Data bulanan

- Jasa dan pendapatan pelabuhan
- Operasional perbekalan dari dalam dan luar pelabuhan
- Usaha pengolahan ikan
- Kondisi fasilitas
- Masalah dan upaya
- Realisasi anggaran
- Nilai ekonomi
- Kegiatan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K5)

3. Data tahunan atau situasional

Data tahunan atau situasional adalah data Industri di pelabuhan perikanan yang meliputi data harian dilakukan input data setiap hari, data bulanan dilakukan input data setiap awal bulan berikutnya sedangkan untuk data tahunan atau situasional dilakukan update data setiap tahun atau setiap ada momen kegiatan situasional.

PENILAIAN EVALUASI KINERJA

Dari data yang dientry dalam aplikasi PIPP dari seluruh UPT pelabuhan perikanan (22 UPT Pelabuhan pusat dan 126 UPT Pelabuhan daerah), dilakukan pengolahan data dan penilaian kinerja operasional pelabuhan perikanan (EVKIN PP) yang mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 20/KEP-DJPT/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja pelabuhan perikanan. Hasil penilaian untuk PPS Cilacap dalam 2 tahun. Secara umum Kinerja Operasional Tahun 2025 PPS Cilacap rata-rata “sangat baik”. Evaluasi Kinerja PPS Cilacap Tahun 2024-2025 dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Evaluasi Kinerja PPS Cilacap Tahun 2024-2025

No	Bulan	Tahun 2024		Tahun 2024	
		Nilai	Kesimpulan	Nilai	Kesimpulan
1	Januari	88,25	Sangat Baik	89,25	Sangat Baik
2	Februari	87,25	Sangat Baik	88,50	Sangat Baik
3	Maret	89,25	Sangat Baik	89,50	Sangat Baik
4	April	82,75	Sangat Baik	90,25	Sangat Baik
5	Mei	90,25	Sangat Baik	92,50	Sangat Baik
6	Juni	89,25	Sangat Baik	92,50	Sangat Baik
7	Juli	95,50	Sangat Baik	95,50	Sangat Baik
8	Agustus	92,75	Sangat Baik	97,00	Sangat Baik
9	September	92,75	Sangat Baik	97,00	Sangat Baik
10	Oktober	94,75	Sangat Baik	96,00	Sangat Baik
11	Nopember	92,75	Sangat Baik	90,50	Sangat Baik
12	Desember	92,75	Sangat Baik	91,00	Sangat Baik

Hal ini tidak lepas dari upaya peningkatan kinerja operasional pelabuhan dan pelayanan kepada stakeholder serta mendorong kinerja enumerator dan operator untuk lebih aktif melakukan pencatatan dan entry data aktivitas di PPS Cilacap sesuai aplikasi yang telah ada secara terus menerus.

PENGAWASAN KAPAL YANG BERAKTIFITAS DI KAWASAN PELABUHAN

Kegiatan kesyahbandaran dalam kaitannya dengan pengawasan kapal yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah pendataan dan monitoring.

Jumlah armada kapal perikanan secara umum didominasi oleh kapal-kapal ukuran 5 GT kebawah yaitu sebanyak 738 kapal dengan penggerak menggunakan motor tempel/outboard sedangkan untuk kapal > 5 GT yang menggunakan penggerak mesin dalam/inboard sebanyak 814 kapal sehingga total berjumlah 1.552 kapal sebagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Jumlah Kapal Menurut Ukuran dan Jenis Alat Tangkap Tahun 2025.

JENIS ALAT TANGKAP / TYPE OF FISHING GEARS		UKURAN KAPAL / SIZE OF BOAT						JUMLAH / TOTAL
		6 - 10 GT	11 - 20 GT	21 - 30 GT	31 - 50 GT	51 - 200 GT	Motor Tempel / Outboard Engine	
Pancing / Long Line	Rawai Tuna / Long line	-	-	35	3	23	-	61
	Rawai Tetap / Bottom Long Line	-	-	-	-	-	-	-
	Pancing Ulur / Hand line	24	58	527	17	42	-	668
Jaring insang / Gill nets	Jaring insang hanyut / Drift Gillnets	-	14	34	-	-	-	48
	Jaring Sirang / Set Gill nets	-	-	-	-	-	96	96
	Jaring Insang Hanyut Monofilament / Monofilament Drift Gillnet	-	-	-	-	-	77	77
	Jaring tiga lapis / Trammel net	-	-	-	-	-	187	187
Pukat Tarik / Seine net	Payang / Pelagic danish seine	-	-	-	-	-	15	15
	Arad / Demersal danish seine	-	-	-	-	-	363	363
Pukat Cincin/ Purse Seine		-	-	2	2	23	-	27
Pancing Cumi/Squid Jigging		1	-	3	1	4	-	9
Jala Jatuh Berkapal/ Cast Nets		-	-	-	-	1	-	1
Bouke Ami/ Lift Net		-	-	-	-	-	-	-
Angkut / Carrier		-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH / TOTAL		25	72	601	23	93	738	1.552

PELAYANAN PERSETUJUAN BERLAYAR (PB)

Pelayanan PB dilaksanakan di Gedung PTSA dimana prosedur penerbitannya melibatkan instansi terkait, sehingga kapal perikanan akan mendapatkan PB apabila kapal tersebut laik laut, laik tangkap dan laik simpan. Instansi terkait yang dimaksud adalah Satpolair, TNI AL, BPJS, Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) serta Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan (BKK).

Pelaksanaan pelayanan penerbitan Persetujuan Berlayar dilakukan dengan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen kapal perikanan, pemeriksaan teknis, nautis, alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan, pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan.

Jumlah pelayanan PB sampai dengan akhir Desember tahun 2025 sebanyak 3.607 dokumen atau turun sebesar -2,99 % dibandingkan tahun 2024 yaitu sebanyak 3.718 dokumen. Lebih detail Perbandingan Pelayanan PB Periode Tahun 2024 – 2025 dapat dilihat pada Tabel 34 berikut ini.

Tabel 34. Perbandingan Pelayanan PB Periode Tahun 2024 – 2025

No.	Bulan	Penerbitan PB		Kenaikan/Penurunan (%)
		2024	2025	
1	Januari	325	157	-51,69
2	Pebruari	317	375	18,30
3	Maret	147	151	2,72
4	April	332	520	56,63
5	Mei	309	326	5,50
6	Juni	356	293	-17,70
7	Juli	375	369	-1,60
8	Agustus	359	360	0,28
9	September	383	336	-12,27
10	Oktober	387	300	-22,48
11	Nopember	299	275	-8,03
12	Desember	129	145	12,40
Jumlah		3.718	3.607	-2,99

Penurunan jumlah PB yang diterbitkan dikarenakan pada tahun 2025 adanya penurunan jumlah kapal yang beroperasi di PPS Cilacap sehingga mempengaruhi jumlah PB yang diterbitkan.

PENDATAAN LOG BOOK

Pelaksanaan pendataan termasuk didalamnya kegiatan melakukan verifikasi dan validasi Log Book Penangkapan Ikan merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Tujuan Log Book Perikanan adalah:

1. Log Book sebagai landing declaration dari nahkoda, atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan.
2. Log Book perikanan mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, volume).
3. Log Book perikanan mencatat data ijin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal (LxBxD; Power), pelabuhan pangkalan kapal tersebut.
4. Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (fishing capacity, efficiency fishing, musim penangkapan kaitannya dengan open and close session, dan konservasi).

Hasil pelaksanaan pendataan termasuk didalamnya melakukan verifikasi dan validasi Log Book Penangkapan Ikan yang diperiksa oleh Syahbandar atau petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan pada saat kedatangan kapal, sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah sebanyak 3.459 Log Book atau turun -6,66 % bila dibandingkan dengan periode tahun 2024 yaitu sebanyak 3.706 Log Book. Data perbandingan pendataan Log Book disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35. Perbandingan Pendataan Log Book Periode Tahun 2024 – 2025

No.	Bulan	Log Book		Kenaikan/Penurunan (%)
		2024	2025	
1	Januari	250	140	-44,00
2	Pebruari	208	108	-48,08
3	Maret	236	488	106,78
4	April	249	154	-38,15
5	Mei	185	318	71,89
6	Juni	437	370	-15,33
7	Juli	274	266	-2,92
8	Agustus	383	389	1,57
9	September	374	283	-24,33
10	Oktober	405	318	-21,48
11	Nopember	300	304	1,33

12	Desember	405	321	-20,74
Jumlah		3.706	3.459	-6,66

Sesuai dengan Peraturan Ditjen Perikanan Tangkap No.11/PER-DJPT/2019 tentang kewajiban penggunaan e-logbook bagi kapal ukuran > 30 GT, maka mulai November 2019 beberapa kapal ukuran > 30 GT maupun kapal ukuran < 30 GT telah melakukan aktivasi dan melakukan pelaporan melalui aplikasi e-logbook.

PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

Pelayanan penerbitan Sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) merupakan tindak lanjut dari amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Jumlah penerbitan SKKP sampai dengan akhir Desember tahun 2025 sebanyak 272 dokumen atau turun sebesar -37,33 % dibandingkan tahun 2024 yaitu sebanyak 434 dokumen. Penerbitan SKKP pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan oleh dua belas orang petugas. Data Penerbitan SKKP disajikan pada Tabel 36.

Tabel 36. Pelayanan Penerbitan SKKP Periode Tahun 2024 - 2025

No.	Bulan	Penerbitan SKKP		Kenaikan/Penurunan (%)
		2024	2025	
1	Januari	37	41	10,81
2	Pebruari	38	49	28,95
3	Maret	39	59	51,28
4	April	46	37	-19,57
5	Mei	41	39	-4,88
6	Juni	50	5	-90,00
7	Juli	39	8	-79,49
8	Agustus	35	5	-85,71
9	September	37	5	-86,49
10	Oktober	21	4	-80,95
11	Nopember	13	2	-84,62
12	Desember	38	18	-52,63
Jumlah		434	272	-37,33

Penurunan jumlah penerbitan SKKP yang diterbitkan salah satu faktor adalah beberapa kapal ijin Daerah melakukan perpindahan perijinan menjadi ijin Pusat, dikarenakan kapal beroperasi

melakukan penangkapan ikan diatas 12 Mil laut sehingga SKKP diterbitkan oleh Satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (Dit KAPI), DJPT KKP.

PENDATAN PELAKSANAAN DOCKING KAPAL

Pendataan pelaksanaan docking kapal pada tahun 2025 dilayani oleh PT. Tegal Shipyard Utama dan Burhan. Kapal yang melakukan docking pada tahun 2025 sebanyak 241 kapal, atau turun sebesar -6,22 % bila dibanding dengan periode tahun 2024 yaitu sebanyak 256 kapal yang melakukan kegiatan docking sebagaimana secara detail bulan perbulan disampaikan pada Tabel 37.

Tabel 37. Perbandingan Kapal Naik Dock periode Tahun 2024-2025

No.	Bulan	Kapal Docking		Kenaikan / Penurunan (%)
		2024	2025	
1	Januari	21	32	34,38
2	Pebruari	21	29	27,59
3	Maret	22	27	18,52
4	April	20	20	00,00
5	Mei	23	21	-9,52
6	Juni	18	21	14,29
7	Juli	29	11	-163,64
8	Agustus	23	20	-15,00
9	September	18	18	00,00
10	Oktober	20	15	-33,33
11	Nopember	14	7	-100,00
12	Desember	27	20	-35,00
Jumlah		256	241	-6,22

PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN (SHTI)

Pelaksanaan pelayanan SHTI berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam Peraturan Menteri di atas disebutkan bahwa SHTI dapat diterbitkan oleh Competent Outhority apabila ada permohonan untuk produk ikan yang akan di ekspor ke Uni-Eropa.

Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2025 terdapat penerbitan SHTI sebanyak 882 dokumen atau turun sebesar -7,84 % bila dibandingkan periode dengan tahun 2024 yaitu

sebanyak 957 dokumen. Angka Perbandingan Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Periode Tahun 2024 – 2025 di PPS Cilacap dapat dilihat pada Tabel 38 berikut ini.

Tabel 38. Perbandingan Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Periode Tahun 2024 – 2025

No.	Bulan	SHTI		Kenaikan/ Penurunan(%)
		2024	2025	
1	Januari	77	55	-28,57
2	Pebruari	51	43	-15,69
3	Maret	77	26	-66,23
4	April	40	95	137,50
5	Mei	75	69	-8,00
6	Juni	64	51	-20,31
7	Juli	107	45	-57,94
8	Agustus	77	51	-33,77
9	September	94	104	10,64
10	Oktober	121	117	-3,31
11	Nopember	107	104	-2,80
12	Desember	67	122	82,09
Jumlah		957	882	-7,84

Penurunan pelayanan penerbitan SHTI pada tahun 2025, dipengaruhi oleh jumlah kapal yang mendaratkan ikan semakin berkurang.

PELAYANAN SCPIB, SKPI, ASURANSI NELAYAN DAN PKL

Pelayanan SCPIB (Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik), SKPI (Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan), Asuransi Nelayan dan PKL (Perjanjian Kerja Laut) sebagai tindak lanjut pemberlakuan terbitnya peraturan peraturan yang berlaku, implementasinya pada tahun 2025 di PPS Cilacap dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sejak diterbitkannya Permen KP Nomor 16 tahun 2024 Tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, maka PPS Cilacap tidak lagi menerbitkan Sertifikat CPIB.
2. Kepesertaan Asuransi Nelayan sebanyak 31.676 peserta Asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan.
3. PKL yang disahkan sejumlah 25.514 dokumen PKL.

PENYULUHAN PERIKANAN

Salah satu fungsi pemerintahan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah Fasilitas tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan. Dalam rangka pengembangan masyarakat nelayan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang di fasilitasi oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2025 meliputi sebagaimana disajikan dalam tabel 39.

Tabel 39. Jumlah kegiatan sosialisasi dan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025.

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Kegiatan Rekomendasi dan atau Evaluasi Penggunaan Tanah dan Bangunan	80 Orang
2	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran di Wilayah Binaan	57 Orang
3	Rapat Evaluasi dalam rangka implementasi EPIT dan PNBK Pasca Produksi	54 Orang
4	Koordinasi lintas sektor monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu satu atap	80 Orang
5	Rapat Evaluasi PIPP Dan Harga Acuan Ikan	120 Orang
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelabuhan dan Bandar Usaha Sehat (PBUS)	120 Orang
7	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	160 Orang
8	Penanganan kebakaran, keselamatan dan keamanan kapal di Pelabuhan Perikanan Bagi Tim Internal dan Stakeholder	70 Orang
9	Diseminasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	120 Orang
10	Pelaksanaan Pelayanan Scpib	120 Orang
11	Sosialisasi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan di Pelabuhan Perikanan	57 Orang
12	Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	160 Orang
13	Gerakan Bersih Pantai	125 orang
14	Sosialisasi/Peningkatan Kualitas terkait Penerapan Budaya Pelayanan Prima bagi petugas PTSA	51 orang
15	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 terkait Pengelolaan Barang Milik Negara	58 orang
16	Pembinaan Nahkoda Dalam Pengisian Logbook	40 orang
17	Forum Konsultasi Publik dan KPI	90 orang

LAYANAN MEDIA ONLINE

Layanan media online PPS Cilacap merupakan layanan informasi yang disampaikan langsung secara online dalam jaringan internet yang dikemas dalam bentuk informasi. Informasi yang disampaikan dalam layanan media online PPS Cilacap merupakan informasi aktual seputar kegiatan dan kejadian di PPS Cilacap.

JEJARING SOSIAL MEDIA DAN WEBSITE

Jejaring sosial media saat ini bukan hanya sebagai sarana penghubung antar individu namun juga sebagai pusat informasi real time yang berkelanjutan, adapun sosial media yang dimiliki oleh PPS Cilacap meliputi, Instagram dengan jumlah pengikut sebanyak 2.542 pengikut, 618 postingan pada tahun 2025 dan rata-rata disukai sebanyak 30 - 50 suka per postingan, Facebook dengan jumlah pengikut 3.300 pengikut, 587 postingan tahun 2025 dan rata-rata disukai sebanyak 5 – 20 suka per postingan sedangkan Twitter atau yang sekarang lebih dikenal dengan aplikasi X dengan jumlah pengikut sebanyak 469 pengikut, 560 postingan tahun 2025 dan rata-rata disukai sebanyak 5 suka per postingan, YouToube dengan jumlah Subscriber sebanyak 1.051.000 subscriber, 72 postingan tahun 2025 dan rata-rata disukai sebanyak 1 - 10 suka per postingan, Tiktok dengan jumlah pengikut 311 pengikut, 92 postingan tahun 2025 dan rata-rata disukai sebanyak 30-50 suka per postingan.

KEGIATAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA (K5)

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan higienis telah dilakukan kegiatan secara rutin yang dibagi di 6 kawasan, yang meliputi kawasan kantor utama, kawasan pelayanan terpadu, kawasan TPI, kawasan Balai Pertemuan Nelayan, kawasan Dermaga Timur, kawasan Dermaga III dan kawasan Sentra Pengolahan baik secara mandiri ataupun secara periodik. Kegiatan tersebut dapat meliputi kerja bakti di titik-titik khusus yang perlu penanganan lebih lanjut, menyirami tanaman, memangkas daun dan dahan yang tidak rapi dan rimbun, merapikan tanaman dan pohon, memangkas rumput serta pekerjaan lainnya yang dilakukan secara berkala di antara kawasan – kawasan tersebut.

Pelaksanaan kebersihan dan keindahan kawasan pelabuhan perikanan juga kadang melibatkan para stakeholder pengguna jasa untuk bersama sama melaksanakan pembersihan di kawasan pelabuhan perikanan.



Gambar 8. Kegiatan Kebersihan dan Armada Kebersihan



Gambar 9. Kegiatan pemeliharaan tanaman

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pelabuhan perikanan dalam proses aktivitasnya merupakan sebuah bussiness us usual, dimana pelabuhan perikanan menjalankan aktivitasnya bersumber dari beberapa sektor yang saling berkaitan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap membentuk Tim Kemanan Terpadu yang terdiri dari unsur unsur Internal PPS Cilacap, BKK Cilacap, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, BNN Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, BPBD Cilacap, Basarnas, Lanal, Polresta Cilacap, Komandan Koramil 01 Cilacap,

Polairud, Polsek Cilacap Selatan, Satpol PP, Kelurahan, HNSI, Satpam dan Petugas Kereta Dorong, Petugas Timbang dan Petugas Packing, yang bertugas untuk memastikan dan menjaga keamanan dan ketertiban seluruh aktifitas perikanan di Pelabuhan Perikanan sesuai dengan kuasa pengguna anggaran PPS Cilacap Nomor 5744/KPA.PPSC/TU.4/X/2025 yang mengatur tentang penunjukan tim pelaksanaan pengamanan terpadu PNBK pasca produksi pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap TA 2025.

Tim Keamanan Terpadu juga melakukan patroli yang dilakukan secara periodik yang melibatkan unsur internal dan eksternal PPS Cilacap maupun patroli yang dilakukan secara rutin setiap hari oleh petugas keamanan (satpam) PPS Cilacap untuk memastikan kondisi aktivitas kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berjalan dengan kondusif, aman dan lancar.

KESELAMATAN KERJA

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam kawasan pelabuhan sebagai pusat kegiatan ekonomi maka ditempuh langkah-langkah berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan satuan pengamanan bekerjasama dengan Polres Cilacap, pelatihan pemadam kebakaran bekerjasama dengan Dinas Pemadam dan melakukan pelatihan mandiri pemadaman kebakaran bagi pegawai, Satpam dan Petugas Kebersihan PPS Cilacap.



Gambar 10. Alat Keselamatan Kerja di Pelabuhan Perikanan.

Kebakaran dan tim SAR Kabupaten Cilacap. Disamping itu disediakan perlengkapan keselamatan kerja petugas kesyabandaran, kebersihan dan satpam. Peralatan K5 yang dimiliki

PPS Cilacap untuk melaksanakan kebersihan di daratan dan di kolam pelabuhan perikanan telah di sediakan peralatan dan perlengkapan K5 yaitu meliputi:

1. <i>Dump truck</i>	6. <i>Steam pressure gauge</i>
2. <i>Amphibior</i>	7. Kendaraan roda 3
3. <i>Forklift</i>	8. <i>Portable generating set</i>
4. Mesin potong rumput	9. Pompa air
5. Mesin gergaji kayu	10. <i>Jet Cleaner</i>

KESEHATAN PELABUHAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam mengemban fungsi kepelabuhanan, didukung oleh instansi dan unit kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu instansi atau unit kerja yang mendukung adalah Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap yang sesuai dengan peraturan Permenkes RI No.10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara Kegiatan yang dilakukan di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meliputi :

1. Pengamatan vektor (binatang perantara penularan penyakit)
2. Pengendalian vektor
3. Pengamatan kesehatan lingkungan
4. Pengawasan kesehatan kapal
5. Pemeriksaan kesehatan ABK Kapal

Hasil dari setiap kegiatan Kesehatan Pelabuhan di kawasan Pelabuhan Perikanan selama tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dilihat dari indikator pengamatan dan pengendalian vektor berdasarkan pengamatan; kepadatan lalat, pemasangan perangkap tikus, survey nyamuk biasa, dan survey jentik nyamuk di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selalu dibawah standar yang ada. Hal yang paling utama adalah indikator kesehatan lingkungan dan kesehatan kapal, dimana hasil yang dicapai adalah kategori sedang untuk kesehatan lingkungan di kawasan pelabuhan yang meliputi kualitas lingkungan, sanitasi bangunan, pengawasan tempat pengolahan makanan, dan kuaalitas air bersih.

Tim kesehatan pelabuhan juga melakukan pelayanan penerbitan dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) kapal sebanyak 3.617 dokumen, 98 Penerbitan Health Book (HB) / Buku Kesehatan Kapal Nelayan, 68 Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal (SSCEC) kapal, 68 Penerbitan sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan (P3K) kapal, serta melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas bagi para pelaku utama dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan, meliputi pengecekan kesehatan ABK, dan pegawai pelabuhan.

Selain itu Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sehingga dibentuklah Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS yang dibentuk oleh Kantor Kesyahbadaan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cilacap dengan Nomor UM.008/I/17/KSOP.CLP-16 tanggal 17 Oktober 2016 dan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap masuk dalam keanggotaan POKJA tersebut.

Sistem layanan kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan pelabuhan antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan promosi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja;
2. Menyebarluaskan informasi tentang HIV dan AIDS di ruang publik yang ada di lingkungan pelabuhan;
3. Melakukan pemeriksaan Voulenteery Conseling dan Testing (VCT) dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di tempat kerja dengan menggunakan sistem pemeriksaan berjalan (Mobile Clinic) secara berkala.

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Wujud kepedulian pelayanan kepada masyarakat antara lain berupa peran dalam kajian penelitian melalui pemberian kesempatan terhadap siswa dan mahasiswa untuk melaksanakan Magang, PKL dan Penelitian dari lembaga pendidikan SMK dan perguruan tinggi terkemuka di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera.

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat periode Tahun 2025 meliputi mahasiswa/siswa PKL/Magang/Penelitian sebagaimana disajikan dalam tabel 40.

Tabel 40. Jumlah kunjungan mahasiswa, siswa praktik di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025.

BULAN	SEKOLAH / UNIVERSITAS	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
JANUARI	Universitas Jenderal Soedirman	22 Orang	Magang
	Universitas Brawijaya	3 Orang	Penelitian
	Politeknik Banjarnegara	6 Orang	Magang
	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	2 Orang	Penelitian
FEBRUARI	Universitas Jenderal Soedirman	17 Orang	Magang
	Institut Pertanian Bogor	1 Orang	Penelitian
	Universitas Trunojoyo Madura	3 Orang	Magang MBKM
	Universitas Gadjah Mada	3 Orang	Penelitian
	Universitas Gadjah Mada	6 Orang	Magang MBKM
	Universitas Jenderal Soedirman	1 Orang	Penelitian
	Universitas Brawijaya	6 Orang	Magang MBKM
	Institut Pertanian Bogor	1 Orang	Penelitian
MARET	Universitas Jenderal Soedirman	2 Orang	Penelitian
	Politeknik Negeri Cilacap	2 Orang	Observasi Project TA
	Institut Pertanian Bogor	1 Orang	Penelitian
APRIL	Institut Pertanian Bogor	1 Orang	Penelitian
MEI	SMK Negeri 2 Cilacap	4 Orang	PKL
	Universitas Diponegoro	1 Orang	Penelitian
	Universitas Jenderal Soedirman	1 Orang	Penelitian
JUNI	SMK 1 Temon	14 Orang	PKL
	Universitas Diponegoro	2 Orang	Penelitian
	SMK YPE Cilacap	7 Orang	PKL
	Politeknik Banjarnegara	3 Orang	Penelitian
	Universitas Jambi	6 Orang	Magang
	Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jakarta	2 Orang	Magang
JULI	Universitas Brawijaya	11 Orang	PKL
	Universitas Padjadjaran	7 Orang	PKL
	Universitas Gadjah Mada	1 Orang	Magang
	Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jakarta	2 Orang	PKL
	Universitas AMIKOM Purwokerto	1 Orang	PKL

BULAN	SEKOLAH / UNIVERSITAS	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
	Institut Pertanian Bogor	1 Orang	Magang
	Universitas Padjadjaran	3 Orang	Magang
AGUSTUS	SMK Negeri 2 Cilacap	3 Orang	PKL
	Politeknik Negeri Cilacap	5 Orang	Magang
	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan	5 Orang	Magang Industri
	Universitas Terbuka	1 Orang	Penelitian
	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	2 Orang	Magang
SEPTEMBER	Universitas Terbuka	1 Orang	Magang
	Universitas Padjadjaran	7 Orang	Penelitian
	Insitut Pertanian Bogor	3 Orang	Magang
	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	9 Orang	Magang
OKTOBER	Universitas Padjadjaran	77 Orang	Kunjungan Pratikum
	Institut Pertanian Bogor	1 Orang	Penelitian
	Universitas Amikom Yogyakarta	1 Orang	Penelitian
	Universitas Jenderal Soedirman	1 Orang	Penelitian
NOVEMBER	SMK Negeri 4 Purworejo	79 Orang	Kunjungan Study Lapangan
	Universitas Jenderal Soedirman	11 Orang	Praktikum Lapang Mini Riset
	Universitas Dr. Soetomo Surabaya	1 Orang	Penelitian
	Universitas Gadjah Mada	1 Orang	Penelitian
	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan	6 Orang	Penelitian
DESEMBER	Universitas Brawijaya	1 Orang	Penelitian
	Universitas Jenderal Soedirman	1 Orang	Penelitian
	Universitas Jenderal Soedirman	8 Orang	Magang Kerja
	Institut Pertanian Bogor	1 Orang	Magang

SURAT MENYURAT

Selama tahun 2024 jumlah penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip di PPS Cilacap ada terdapat kurang lebih 4.624 surat yang terdiri dari 1.866 surat masuk dan 2.758 surat keluar. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat kurang lebihnya sebanyak 4.385 surat yang terdiri dari 1.770 surat masuk dan 2.615 surat keluar. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, aliran keluar masuk surat di PPS Cilacap pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni sebesar 11%. Data Perbandingan surat masuk dan surat keluar per bulan pada tahun 2024-2025 dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Perbandingan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2024-2025

No	Bulan	Jenis Surat			
		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1.	Januari	180	289	150	321
2.	Februari	176	218	133	198
3.	Maret	117	174	131	185
4.	April	181	185	93	139
5.	Mei	134	265	142	193
6.	Juni	124	189	147	185
7.	Juli	175	240	165	258
8.	Agustus	164	249	159	275
9.	September	130	194	156	273
10.	Oktober	151	268	133	198
11.	November	153	214	176	137
12.	Desember	181	273	185	253
Jumlah		1866	2758	1.770	2.615

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Tahun 2025 merupakan gambaran menyeluruh atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Secara umum, kinerja PPS Cilacap menunjukkan capaian yang sangat baik, tercermin dari realisasi indikator kinerja utama yang melampaui target dengan nilai capaian sebesar 117,27% dan masuk dalam kategori “Istimewa”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait efisiensi anggaran dan dinamika operasional di lapangan.

Dari aspek pelayanan publik, PPS Cilacap terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), inovasi digital seperti aplikasi SI ANTASENA, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan masyarakat dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Dalam aspek operasional, PPS Cilacap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan perusahaan secara seimbang, mulai dari pelayanan kapal, pengawasan aktivitas perikanan, hingga fasilitasi kegiatan ekonomi perikanan. Dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai serta komitmen terhadap pengembangan kompetensi menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja tersebut.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain belum optimalnya penyerapan anggaran terutama pada belanja modal, yang disebabkan oleh faktor pemblokiran anggaran dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan konstruksi. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan serta peningkatan efisiensi operasional di tengah tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan di masa mendatang, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. **Optimalisasi Perencanaan dan Penyerapan Anggaran**

Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan serta mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada belanja modal, agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal.

2. **Penguatan Inovasi dan Transformasi Digital**

Melanjutkan dan mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

3. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap unsur-unsur pelayanan, khususnya pada aspek kecepatan respon dan kesesuaian produk layanan, serta meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.

4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan karier yang berkelanjutan.

5. **Penguatan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan**

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait serta stakeholder dalam mendukung kelancaran operasional dan pengembangan pelabuhan.

6. **Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian**

Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai capaian dan upaya perbaikan yang telah dilakukan, PPS Cilacap diharapkan dapat terus meningkatkan perannya sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing. Laporan tahunan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja pada tahun berikutnya, sehingga keberadaan PPS Cilacap dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta kesejahteraan masyarakat.